

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi politik sebagai suatu disiplin ilmu berkembang seiring dengan transformasi relasi antara negara dan pasar dalam sejarah peradaban manusia. Pada abad ke-18, Adam Smith (1776) dalam *The Wealth of Nations* menekankan pentingnya pasar bebas dan peran minimal negara dalam ekonomi. Smith mengkritik intervensi negara yang berlebihan karena dapat menghambat efisiensi ekonomi dan kebebasan individu dalam menjalankan usaha. Namun, gagasan ini ditentang oleh Karl Marx (1867) dalam *Das Kapital*, yang melihat bahwa kekuasaan ekonomi cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir elit kapitalis yang memanfaatkan instrumen politik untuk mempertahankan dominasinya atas kelas pekerja. Marx menegaskan bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari struktur politik karena negara sering kali menjadi alat bagi kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

Dalam perkembangannya, teori ekonomi politik modern menghadirkan perspektif yang lebih kompleks, salah satunya melalui pendekatan liberalisme dalam ekonomi politik. Joseph Schumpeter (1942) dalam *Capitalism, Socialism, and Democracy* menyoroti peran inovasi dan kewirausahaan dalam sistem kapitalisme yang dinamis. Namun, ia juga mengakui bahwa aktor politik sering kali memiliki insentif untuk mempertahankan status quo melalui berbagai bentuk

intervensi, baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan proteksionis. Dalam konteks hubungan negara dan bisnis, teori *rent-seeking* yang dikemukakan oleh Anne Krueger (1974) menunjukkan bahwa aktor bisnis sering kali lebih fokus pada upaya memperoleh keuntungan melalui jalur politik dibandingkan dengan meningkatkan produktivitas. Hal ini relevan dalam memahami fenomena bagaimana perusahaan daerah bergantung pada dukungan politik untuk mendapatkan akses terhadap proyek-proyek strategis.

Liberalisme dalam ekonomi politik modern yang dikembangkan oleh North (1990) menekankan bahwa institusi politik dan ekonomi saling memengaruhi dalam membentuk regulasi yang mengatur dunia bisnis. North menjelaskan bahwa kelembagaan yang kuat menjadi faktor utama dalam memastikan stabilitas ekonomi dan politik yang dapat mendorong pertumbuhan. Dalam konteks perusahaan daerah, pendekatan ini relevan dalam memahami bagaimana regulasi dan institusi pemerintah dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat bagi kinerja BUMD.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), persoalan utama yang sering muncul tidak selalu berkaitan dengan ketiadaan modal secara struktural, melainkan dengan bagaimana modal publik tersebut dikelola dan diaktivasi melalui mekanisme politik daerah. Pada PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI), sekitar 90 persen kepemilikan saham perusahaan berada pada Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga secara formal perusahaan tidak mengalami kekurangan modal kepemilikan. Namun demikian, keberadaan modal tersebut tidak serta-merta menjamin fleksibilitas dan kemandirian perusahaan dalam menjalankan strategi bisnisnya, karena setiap keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengalokasian, dan penambahan modal daerah harus melalui prosedur politik formal, termasuk pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kondisi ini menjadikan kinerja perusahaan sangat bergantung pada keputusan politik pemegang saham pengendali, bukan semata pada pertimbangan ekonomi dan rasionalitas bisnis.

PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) sebagai perusahaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi dinamika ekonomi politik yang mencerminkan problematika hubungan bisnis dan politik di tingkat lokal. Beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini meliputi ketergantungan terhadap dukungan politik. PT SCI tidak mendapatkan sokongan dana dari pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendanaan sangat bergantung pada efektivitas lobi politik dan relasi antara direksi dengan aktor politik utama di pemerintahan daerah.

Direksi PT SCI mengalami juga tantangan dalam menjalankan kebijakan secara berkelanjutan karena minimnya dukungan politik yang kuat. Pergantian direksi yang terjadi akibat perubahan kepemimpinan

politik sering kali berimplikasi pada perubahan kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal kemitraan bisnis. Selain itu, PT SCI memiliki saham senilai Rp 245 miliar, tetapi aset ini tidak dalam bentuk likuid, sehingga sulit untuk dioptimalkan tanpa adanya sokongan dana dari pemerintah. Keterbatasan ini memperlihatkan bagaimana keputusan politik berpengaruh terhadap keberlanjutan operasional BUMD.

PT SCI dibandingkan dengan BUMD di Provinsi lain terletak pada struktur bisnisnya yang lebih luas dan terdiversifikasi. Berbeda dengan kebanyakan BUMD yang hanya mengelola satu atau beberapa bidang usaha yang spesifik, PT SCI mengelola berbagai sektor, termasuk jasa, perdagangan, properti, hingga transportasi seperti kereta api. PT SCI juga menjalin berbagai kemitraan strategis dengan perusahaan swasta dalam menjalankan bisnisnya. Diversifikasi usaha ini membuat PT SCI mampu bertahan meskipun menghadapi tantangan finansial dan ketidakpastian kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki banyak unit bisnis, strategi pengelolaan yang tepat dapat memastikan stabilitas dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam aspek proses dukungan politik terhadap perusahaan daerah, teori *Political Economy of Institutions* menjadi relevan. Teori ini menjelaskan bagaimana institusi politik dan birokrasi mempengaruhi kebijakan ekonomi dan pelaksanaan regulasi dalam suatu sistem pemerintahan. North (1990) menyatakan bahwa institusi yang lemah

dapat menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada dunia usaha. Dalam konteks PT SCI, hal ini tercermin dalam bagaimana penyusunan regulasi yang tidak konsisten, alokasi anggaran yang tidak mendukung pertumbuhan bisnis, serta jaringan politik yang berperan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan.

Dukungan politik dapat berpengaruh terhadap kinerja BUMD, dengan pendekatan teori *Public Choice* hal tersebut dapat di uraikan. Teori ini berargumen bahwa aktor politik, termasuk pejabat pemerintahan dan birokrat, memiliki kepentingan sendiri dalam mendistribusikan sumber daya publik. Hal ini menjelaskan bagaimana penyusunan regulasi dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu yang sering kali tidak sejalan dengan efisiensi ekonomi. Dalam kasus PT SCI, penyusunan regulasi yang lambat dan birokrasi yang kompleks menjadi faktor penghambat utama dalam memperoleh dukungan politik yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, konsep *rent-seeking* dalam ekonomi politik juga dapat menjelaskan bagaimana perusahaan daerah terjebak dalam dinamika ketergantungan politik. Krueger (1974) menjelaskan bahwa perusahaan yang bergantung pada hubungan politik untuk memperoleh proyek strategis sering kali tidak berorientasi pada peningkatan daya saing dan efisiensi, melainkan pada upaya mempertahankan akses terhadap kebijakan yang menguntungkan mereka. PT SCI menghadapi

kondisi serupa, di mana perusahaan harus melakukan berbagai upaya lobi politik agar dapat memperoleh dukungan regulasi dan finansial.

Dalam penelitian ini, konsep ketergantungan politik pada BUMD akan dianalisis berdasarkan tiga aspek utama: pertama, Dalam penelitian ini, konsep ketergantungan politik pada BUMD dianalisis berdasarkan tiga aspek utama. Pertama, ketergantungan terhadap keputusan politik pemegang saham mayoritas dalam mengaktivasi, memanfaatkan, dan menambah modal daerah, yang membatasi fleksibilitas dan otonomi korporasi. Kedua, ketergantungan terhadap regulasi yang mencerminkan peran birokrasi dan hambatan hukum dalam operasional perusahaan daerah. Ketiga, ketidakmampuan bersaing secara efektif yang menunjukkan keterbatasan perusahaan daerah dalam menghadapi kompetisi dengan sektor swasta yang lebih fleksibel dan inovatif.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara dukungan politik dan kinerja BUMD, khususnya dalam konteks PT SCI. Dengan menggali lebih dalam aspek keunikan dan urgensi dari dinamika ekonomi politik yang dihadapi PT SCI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi model yang ideal dalam dukungan politik terhadap kinerja BUMD serta menjadi rujukan akademik dalam kajian ekonomi politik perusahaan daerah.

B. Pokok Masalah

Fokus utama dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk dan praktik dukungan politik yang memengaruhi kinerja badan usaha milik daerah Sulawesi Selatan, khususnya dalam konteks PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) sebagai BUMD strategis di bawah kendali Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketergantungan yang sangat kuat terhadap kekuatan politik lokal menjadikan perusahaan ini tidak hanya beroperasi dalam logika korporasi, tetapi juga dalam arena negosiasi kekuasaan yang sarat kepentingan politik, terutama dalam hal penyertaan modal, perubahan kebijakan, dan arah kemitraan strategis.

PT SCI tidak pernah menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah selama lebih dari 15 tahun. Sebaliknya, akses terhadap dukungan anggaran dan regulasi sangat ditentukan oleh kemampuan direksi menjalin hubungan politis dengan pemegang otoritas, baik eksekutif maupun legislatif daerah. Situasi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya desain kelembagaan dan pengelolaan yang berorientasi pada kinerja profesional, tetapi juga menunjukkan bagaimana proyek-proyek strategis yang diinisiasi oleh perusahaan justru sangat tergantung pada siklus politik lokal, termasuk dinamika pergantian kepemimpinan kepala daerah dan konfigurasi DPRD.

Dalam praktiknya, perusahaan tidak hanya menjadi objek dari kebijakan daerah, tetapi juga menjadi instrumen atau bahkan alat tawar

dalam manuver politik elit lokal. Ketika kepemimpinan politik berubah, arah kebijakan perusahaan pun turut bergeser, yang berdampak pada tidak berjalannya proyek strategis secara berkelanjutan, stagnasi investasi, bahkan perombakan direksi secara periodik berdasarkan pertimbangan politik, bukan performa manajerial.

Fenomena ini diperkuat oleh kenyataan bahwa perusahaan justru terdorong masuk ke dalam praktik rent-seeking, di mana lobbying terhadap pemerintah menjadi strategi utama, bukan peningkatan inovasi, efisiensi, atau daya saing. Dalam konteks inilah, muncul ketegangan struktural antara tujuan profesional perusahaan dengan praktik politik lokal yang transaksional dan penuh kepentingan jangka pendek. Berdasarkan dinamika tersebut, terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu digarisbawahi dalam penelitian ini, antara lain:

1. Ketergantungan Modal

PT SCI mengalami stagnasi pengembangan usaha karena sangat bergantung pada dukungan politik untuk mendapatkan penyertaan modal. Akses terhadap modal menjadi sangat politis dan tidak berbasis pada analisis bisnis yang objektif.

2. Ketergantungan terhadap Regulasi

Perubahan kebijakan dan arah regulasi sangat ditentukan oleh kepentingan politik, bukan kebutuhan operasional perusahaan.

Regulasi yang inkonsisten menghambat fleksibilitas dan ekspansi usaha PT SCI.

3. Ketidakmampuan Bersaing dan Tekanan Politik

BUMD ini tidak memiliki ruang inovasi karena tekanan dari kepentingan politik justru menjebakanya dalam praktik populisme ekonomi. Upaya pengembangan unit bisnis kerap kali terganjal oleh ketidakpastian arah politik daerah.

4. Ketidakstabilan Akibat Jaringan Politik

Keputusan-keputusan strategis dalam manajemen PT SCI lebih ditentukan oleh relasi personal antara direksi dan aktor politik. Hal ini menciptakan ketergantungan struktural yang mengancam keberlanjutan bisnis jangka panjang.

5. Absennya Model Relasi Ideal antara Politik dan Bisnis

Desain institusional dan kerangka politik yang mampu mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara adil dan produktif belum tersedia hingga kini. Ketiadaan desain tersebut menghambat terwujudnya relasi yang mutualistik dan profesional antara aktor politik sebagai pemangku kepentingan dan BUMD sebagai entitas ekonomi daerah. Dalam konteks tata kelola yang ideal, relasi antara keduanya semestinya dibangun atas dasar prinsip akuntabilitas, otonomi kelembagaan, serta pembagian kewenangan yang jelas dan seimbang. Namun lemahnya struktur kelembagaan dan ambiguitas

peran politik dalam proses bisnis BUMD justru menciptakan ruang bagi praktik intervensi, ketidakpastian regulatif, serta ketergantungan yang tidak sehat antara korporasi daerah dan elite pemerintahan.

Dengan demikian, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bukan hanya pada tingkat praktik manajerial, tetapi juga pada tataran struktural, relasional, dan kelembagaan. Hal ini menuntut perumusan model ideal tentang bagaimana dukungan politik seharusnya dikonstruksikan agar mendukung, bukan melemahkan, kinerja badan usaha milik daerah di masa depan.

C. Konteks Penelitian

Keberadaan perusahaan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sering kali menjadi sorotan karena adanya keterkaitan dengan pemerintah daerah dan aktor politik di daerah. Dalam hal ini, PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) menjadi contoh konkret bagaimana hubungan antara perusahaan daerah dan aktor politik berperan dalam menentukan keberlanjutan usaha. Ketergantungan PT SCI terhadap dukungan politik bukan hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga dalam regulasi, kebijakan, serta akses terhadap proyek-proyek strategis. Hal ini mencerminkan bagaimana institusi politik dan ekonomi saling berinteraksi dalam membentuk dinamika perusahaan daerah.

PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) merupakan perusahaan daerah yang telah berstatus sebagai Perseroan Daerah (Perseroda) sejak tahun 2020 dan memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan selaku pemegang saham mayoritas. Dalam kondisi ideal, perusahaan daerah seperti PT SCI seharusnya mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi lokal melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun pada kenyataannya, PT SCI menghadapi berbagai tantangan kelembagaan yang muncul akibat ketidakpastian dukungan politik dan arah kebijakan dari pemerintah daerah, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) menghadapi salah satu permasalahan utama dalam bentuk keterlambatan realisasi penyertaan modal yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2021, jajaran direksi telah mengusulkan penyertaan modal secara berkelanjutan, namun hingga kini usulan tersebut masih tertahan pada tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Keterlambatan ini mencerminkan dinamika politik yang berlarut-larut, yang pada akhirnya menghambat kesinambungan operasional perusahaan. Ketergantungan terhadap keputusan politik tanpa kejelasan waktu dan arah kebijakan menimbulkan ketidakpastian institusional yang berdampak pada lemahnya perencanaan strategis dan rendahnya fleksibilitas PT SCI dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara optimal.

Perubahan kepemimpinan politik juga berdampak signifikan terhadap kebijakan perusahaan. Direksi PT SCI harus menghadapi tantangan dalam menyesuaikan strategi bisnis dengan kebijakan pemerintah daerah yang terus berubah. Sebagai contoh, selama masa kepemimpinan Yasir Machmud sebagai Direktur Utama (2021-2023), PT SCI berupaya melakukan ekspansi bisnis melalui berbagai sektor seperti jasa, perdagangan, properti, dan transportasi. Namun, kebijakan ini mengalami hambatan ketika terjadi pergantian kepemimpinan, yang menyebabkan adanya perubahan strategi perusahaan yang berdampak pada keberlanjutan beberapa proyek yang telah dirintis sebelumnya.

Dibandingkan dengan BUMD lainnya di Indonesia, PT SCI memiliki model bisnis yang lebih luas dan terdiversifikasi, berbeda dengan Provinsi lain seperti Jawa Barat yang BUMD-nya berdiri secara khusus berdasarkan bidang usaha tertentu misalnya PT Agro Jabar yang bergerak dibidang usaha agro, PT Jasa Sarana yang bergerak dibidang infrastruktur dan PT Jaswita Jabar yang bergerak dibidang perhotelan, mal dan properti. PT SCI tidak hanya mengelola satu sektor usaha, melainkan beberapa sektor secara simultan, termasuk perdagangan, properti, transportasi, dan kemitraan dengan perusahaan swasta lainnya. Berbeda dengan BUMD di provinsi lain yang cenderung memiliki entitas bisnis yang lebih spesifik, PT SCI justru memiliki model bisnis multi-sektor yang memungkinkan

perusahaan memiliki fleksibilitas dalam merespons peluang pasar. Namun, model ini juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan, terutama terkait dengan keterlibatan aktor politik dalam menentukan arah kebijakan perusahaan.

Dalam rangka pengembangan bisnis yang berorientasi pada pendapatan perusahaan maka PT SCI melakukan perombakan manajemen terhadap unit bisnis jangka panjang serta unit bisnis yang telah berjalan. Selain itu, dengan memanfaatkan label perusahaan sebagai BUMD, PT SCI membangun kerja sama dengan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa dinas dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nilai persaingan dengan perusahaan swasta lainnya. Adapun upaya kerja sama kemitraan dalam bentuk program dan unit bisnis PT SCI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Unit dan Program Bisnis PT SCI Sulawesi Selatan

No.	Unit Bisnis	Program	Mitra
1.	Unit parkir	Pengelolaan lahan parkir Mal & Kompleks Latanete Plaza, RS. Fatimah dan Kawasan <i>Center Point of Indonesia</i> .	Mall & Kompleks Latanete Plaza, RS. Fatimah dan Kawasan <i>Center Point of Indonesia</i>
2.	Unit properti dan aset	Pengelolaan hotel Grand Sayang Park, Gedung Juang 45, Ruko dan Mal Latanete Plaza, Eks Rumah Dinas Koptu Harun dan Pengelolaan <i>Food Court</i> Lego-Lego Kawasan CPI.	-

No.	Unit Bisnis	Program	Mitra
3.	Unit agrobisnis	Pengelolaan pabrik pengolahan jagung dan penjualan pupuk bersubsidi.	PT SRA dan PT PRI
4.	Unit kereta api	Pengelolaan dan pengoperasian kereta api rute Kota Makassar – Kota Parepare.	PT KAI
5.	Unit rental kendaraan	Menyediakan armada kendaraan mulai dari mobil dinas, mobil barang hingga kendaraan truk dan bus.	-
6.	Unit bengkel otomotif	Perawatan dan pemeliharaan kendaraan.	
7.	Unit transporter limbah B3 medis	Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).	PT. Berkah
8.	Unit bisnis <i>food court</i> Lego-lego	Pengelolaan dan penyewaan 36 unit <i>tenant food court</i> lego-lego kepada pemerintah	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
9.	Unit distributor semen	Penjualan semen kepada kontraktor lokal yang memenangkan proyek pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur di Sulawesi Selatan	PT Semen Tonasa
10.	Unit travel dan perjalanan	Melakukan pemasaran kepada perangkat daerah agar perjalanan dinas dilakukan menggunakan jasa travel perusahaan daerah.	Anta Expres Tour Travel
11.	Unit pengelolaan tambang	Pengelolaan tambang eks Vale di Luwu Timur (Blok Pongkeru, Bulu Balang dan Lingke Utara).	-
12.	Unit bisnis <i>outsourcing</i>	Menyediakan tenaga kerja <i>outsourcing</i> sesuai permintaan dari organisasi perangkat daerah (OPD)	-

Sumber: Penulis, 2025

Selain upaya kerja sama kemitraan dalam bentuk program dan unit bisnis, PT SCI juga melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah perusahaan dalam sektor agrobisnis, usaha bahan baku air minum, usaha transportasi publik dan penunjukan pekerjaan bagi perusahaan daerah yang diusulkan kepada pemerintah. Adapun langkah yang diambil adalah dengan membentuk empat anak perusahaan sebagai berikut :

Tabel 2. Subsidiary Company (Anak Perusahaan) PT SCI Sulawesi Selatan

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Tahun di Bentuk
1.	PT Sulsel Raja Agro (SRA)	Agrobisnis	2021
2.	PT Mamminasata Raja Trans (MRT)	Transportasi Publik	2021
3.	PT Sulsel Andalan Nusantara (SAN)	<i>Outsourcing</i>	2022
4.	PT Sulsel Tirta Sejahtera (STS)	Sistem Penyedia Air Minum (SPAM)	

Sumber: Penulis, 2025

Dalam konteks hubungan antara dukungan politik dan kinerja BUMD, teori *Political Economy of Institutions* menjadi relevan dalam menjelaskan bagaimana institusi politik dan ekonomi mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan daerah. North (1990) menjelaskan bahwa kelembagaan yang lemah dapat menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi yang berdampak pada dunia usaha. Dalam kasus PT SCI, tidak adanya kebijakan yang stabil terkait penyertaan modal dan perubahan regulasi yang terjadi secara dinamis

mencerminkan bagaimana ketidakpastian politik dapat berdampak langsung pada keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, pendekatan *Public Choice Theory* juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana proses penyusunan regulasi, alokasi anggaran, dan jaringan politik mempengaruhi keputusan strategis dalam BUMD. Buchanan & Tullock (1962) menyoroti bagaimana kepentingan politik individu dalam lembaga pemerintahan sering kali menentukan arah kebijakan ekonomi. Dalam kasus PT SCI, keterlibatan DPRD dalam pembahasan penyertaan modal menunjukkan bagaimana kepentingan politik dapat mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan daerah. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan aktor politik tertentu lebih rentan terhadap perubahan kebijakan ketika terjadi pergantian kepemimpinan, yang berimplikasi pada ketidakstabilan operasional.

Fenomena ini juga berhubungan dengan konsep *rent-seeking*, di mana perusahaan daerah yang memiliki akses terhadap aktor politik sering kali lebih fokus pada mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang menguntungkan mereka, dibandingkan dengan peningkatan daya saing yang berbasis inovasi. PT SCI menghadapi kondisi serupa, di mana akses terhadap proyek strategis dan pendanaan sangat bergantung pada hubungan dengan pemerintah daerah dan DPRD. Hal ini menciptakan dilema antara efisiensi bisnis dan tuntutan politis, yang

sering kali bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Lebih jauh, ketergantungan PT SCI terhadap dukungan politik juga tercermin dalam aspek regulasi dan transparansi. Perusahaan daerah yang mendapatkan dukungan dari aktor politik cenderung menghadapi risiko dalam aspek akuntabilitas, terutama ketika regulasi yang ada tidak secara ketat mengatur hubungan antara perusahaan dan pemerintah daerah. Sebagai akibatnya, praktik bisnis yang kurang transparan dapat muncul, termasuk dalam bentuk pengelolaan dana proyek yang tidak optimal atau alokasi sumber daya yang tidak efisien.

Dukungan politik yang tidak terkontrol juga menciptakan kerentanan terhadap perubahan kebijakan ketika terjadi pergantian kepemimpinan politik. Perusahaan yang sebelumnya bergantung pada koneksi politik tertentu sering kali kehilangan stabilitas operasional akibat perubahan arah kebijakan atau keputusan yang tidak mendukung keberlanjutan perusahaan. Dalam kasus PT SCI, keberlanjutan proyek dan strategi bisnis sangat bergantung pada sejauh mana hubungan perusahaan dengan aktor politik dapat dikelola secara strategis.

Sebagai bukti empiris dari ketergantungan PT SCI terhadap dinamika politik dan regulasi, berikut adalah laporan keuangan tahunan PT SCI yang menunjukkan bagaimana stabilitas aset dan ekuitas perusahaan dipengaruhi oleh keputusan politik:

Tabel 3. Audit Tahunan PT SCI Sulawesi Selatan

PT. SULSEL CITRA INDONESIA (PERSERODA) SULAWESI SELATAN			
NERACA TAHUN 2021,2022,2023			
<i>*(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>			
URAIAN	UN AUDIT	AUDIT	AUDIT
	PER MEI 2023	2022	2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	1.725.254.345	962.353.164	1.623.055.003
Piutang usaha	6.611.165.264	4.128.971.965	1.252.176.265
Piutang lain-lain	-	1.194.792.044	1.128.053.476
Beban dibayar dimuka	5.842.078.613	6.874.905.905	6.874.710.600
Jumlah aset lancar	14.178.498.222	13.161.023.078	10.877.995.344
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan			
Rp. 4.975.657.898,- pada tahun 2022 dan			
Rp. 3.603.561.881,- pada tahun 2021	237.962.192.086	237.764.316.486	257.360.145.210
Aset tidak produktif	4.380.840.081	4.380.840.081	4.380.840.081
Aset lain-lain	16.948.045.612	16.948.045.612	16.948.045.612
Jumlah aset tidak lancar	259.291.077.779	259.093.202.179	278.689.030.903
JUMLAH ASET	273.469.576.001	272.254.225.257	289.567.026.247
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Lancar			
Utang usaha	1.578.169.319	1.085.304.310	596.277.000
Utang pajak	3.695.017.284	3.132.080.518	5.364.431.326
Utang lain-lain	1.395.296.491	935.910.842	1.083.642.423
Beban yang harus dibayar	11.750.000	42.650.000	-

PT. SULSEL CITRA INDONESIA (PERSERODA) SULAWESI SELATAN			
NERACA TAHUN 2021,2022,2023			
*(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
URAIAN	UN AUDIT	AUDIT	AUDIT
	PER MEI 2023	2022	2021
Uang muka penjualan	5.458.680.000	5.100.963.387	3.589.124.826
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun	-	968.754.122	-
Jumlah kewajiban lancar	12.138.913.094	11.265.663.179	10.633.475.575
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang bank jangka panjang	4.527.836.908	3.946.494.126	5.845.035.464
Kewajiban imbalan kerja	-	1.046.286.613	-
Jumlah kewajiban jangka panjang	4.527.836.908	4.992.780.739	5.845.035.464
EKUITAS			
Modal saham	250.423.000.000	250.423.000.000	269.219.000.000
Modal disetor lainnya	269.581.846	269.581.846	269.581.037
Cadangan modal	239.129.401	239.129.401	239.129.401
Laba ditahan	4.599.296.276	2.060.804.770	1.031.049.169
Laba tahun berjalan	1.271.818.476	3.003.265.322	2.329.755.601
JUMLAH EKUITAS	256.802.825.999	255.995.781.339	273.088.515.208
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	273.469.576.001	272.254.225.257	289.567.026.247

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban PT SCI Tahun, 2023

Data ini menunjukkan bagaimana kondisi keuangan PT SCI bergantung pada stabilitas dukungan politik dan akses terhadap kebijakan pendanaan. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini

akan menyoroti bagaimana faktor regulasi, kebijakan politik, dan jaringan politik mempengaruhi kinerja PT SCI secara langsung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada persoalan dukungan politik terhadap kinerja badan usaha milik daerah, yang merupakan isu kompleks dengan dampak signifikan terhadap tata kelola dan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan daerah sering kali berada di bawah pengaruh aktor politik, baik dalam proses pengambilan keputusan strategis maupun dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. Fenomena ini memunculkan berbagai tantangan yang perlu dikaji secara mendalam.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketergantungan perusahaan daerah terhadap dukungan politik, yang sering kali menjadi faktor penentu akses terhadap pendanaan, proyek strategis, dan kemudahan regulasi. Ketergantungan ini, meskipun memberikan keuntungan jangka pendek, dapat menciptakan ketidakstabilan operasional ketika terjadi perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan politik. Selain itu, tekanan politik yang berlebihan dapat memaksa perusahaan mengambil keputusan yang tidak efisien, seperti menjalankan kebijakan populis yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik *good corporate governance*.

Intervensi politik juga menjadi tantangan dalam pengelolaan perusahaan daerah. Banyak perusahaan daerah mengalami dilema

antara memenuhi tuntutan politis dan mempertahankan profesionalisme serta efisiensi operasional. Sebagai contoh, keputusan untuk menetapkan harga layanan yang lebih rendah demi kepentingan politik sering kali mengorbankan keseimbangan keuangan perusahaan. Praktik ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga menurunkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Hubungan erat dengan aktor politik sering kali membawa dampak negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan daerah. Masalah seperti pelaporan keuangan yang tidak optimal, pengelolaan proyek yang tidak efisien, serta keterlibatan dalam praktik korupsi menjadi tantangan besar. Ketergantungan pada koneksi politik juga menciptakan risiko *financial distress*, terutama ketika perusahaan harus menanggung utang besar akibat tekanan politik untuk mendukung agenda tertentu tanpa analisis kelayakan yang matang.

Permasalahan lainnya adalah kerentanan perusahaan daerah terhadap pergantian kepemimpinan politik, yang dapat memengaruhi stabilitas operasional. Ketika dukungan politik bergeser, perusahaan yang sebelumnya bergantung pada koneksi tertentu sering kali kehilangan akses ke proyek strategis atau pendanaan, yang berdampak pada keberlanjutan bisnis mereka. Hal ini juga memengaruhi persepsi investor, yang melihat perusahaan dengan koneksi politik sebagai entitas dengan risiko tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana arah dukungan politik mempengaruhi kinerja badan usaha milik daerah, mengidentifikasi pola hubungan antara aktor politik dan manajemen perusahaan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat antara politik dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, diharapkan perusahaan daerah dapat lebih mandiri, kompetitif, dan berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Atas dasar inilah penelitian ini menjadi penting karena terdapat banyak asumsi yang bisa diambil untuk mendeskripsikan persoalan-persoalan tersebut, yang dirangkum dalam pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa perusahaan daerah sangat bergantung pada dukungan politik dalam menjalankan proyek strategisnya?
2. Bagaimana proses dukungan politik dilaksanakan dalam mendukung kinerja badan usaha milik daerah?
3. Bagaimana Model ideal tentang dukungan politik terhadap kinerja badan usaha milik daerah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menguraikan alasan perusahaan daerah sangat bergantung pada dukungan politik dalam menjalankan proyek strategis.

2. Untuk menganalisis dan menguraikan proses dukungan politik dilaksanakan dalam mendukung kinerja badan usaha milik daerah
3. Untuk merumuskan Model ideal tentang dukungan politik terhadap kinerja badan usaha milik daerah

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi politik kelembagaan, khususnya dalam memahami hubungan antara dukungan politik dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini memperluas penerapan teori *Political Economy of Institutions* dengan menunjukkan bahwa politik tidak selalu berfungsi sebagai faktor intervensi yang bersifat distorsif terhadap kinerja perusahaan daerah, tetapi juga dapat berperan sebagai mekanisme fasilitatif apabila dikonstruksikan dalam kerangka kelembagaan yang terbuka dan terkontrol.

Selain itu, penelitian ini mengembangkan pemahaman teoritis mengenai konsep dukungan politik dengan membedakannya secara tegas dari praktik patronase dan intervensi politik langsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan politik dapat dipahami sebagai proses kelembagaan yang melibatkan regulasi, pengambilan keputusan kebijakan, serta pengelolaan akses terhadap sumber daya publik, bukan semata-

mata relasi personal atau transaksi politik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan klarifikasi konseptual yang memperkaya diskursus akademik mengenai relasi politik dan kinerja organisasi ekonomi publik.

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengayaan literatur *Public Choice* dan *rent-seeking* dengan menghadirkan konteks empiris BUMD di Indonesia, yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian ekonomi politik. Melalui analisis proses dukungan politik dari hulu ke hilir, penelitian ini menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengkaji dinamika serupa pada perusahaan daerah atau entitas ekonomi publik lainnya di berbagai daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan riset lanjutan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan komparatif dalam studi ekonomi politik pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel terhadap perusahaan daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan perusahaan. Memberikan wawasan akademik yang lebih mendalam dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan dan penyertaan modal bagi BUMD, sehingga

keputusan yang diambil lebih berbasis pada prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan profesional dengan aktor politik, sehingga meminimalkan risiko ketergantungan politik yang berlebihan serta meningkatkan daya saing perusahaan secara mandiri. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dan transparansi perusahaan daerah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap BUMD serta memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika politik dan ekonomi dalam pengelolaan perusahaan daerah serta menawarkan solusi praktis dalam membangun hubungan politik yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi BUMD.

G. Kerangka Teoritik

1. Pendekatan Ekonomi Politik

Kesalahpahaman mengenai konsep ekonomi politik masih sering terjadi di berbagai kalangan. Sebagian besar pihak cenderung menyamakan ekonomi politik dengan politik ekonomi atau memandangnya sebagai sekadar gabungan dari ilmu politik dan ekonomi. Bahkan, istilah ini sering dipakai untuk menganalisis kedua disiplin tersebut secara terpisah, tanpa memahami keterkaitan

sistemiknya. Padahal, pendekatan ekonomi politik justru menolak pemisahan antara dimensi ekonomi dan politik karena keduanya saling memengaruhi secara substantif dan struktural. Meski demikian, integrasi antara kajian ekonomi dan politik tidak mudah dilakukan karena perbedaan paradigma, pendekatan metodologis, dan orientasi analisis yang melekat pada masing-masing disiplin.

Menurut Erani, yang membedakan pendekatan ekonomi politik dari pendekatan ekonomi murni adalah perspektifnya tentang bagaimana kekuasaan terorganisir dalam masyarakat. Teori ekonomi politik bergantung pada gagasan bahwa ilmu politik dan ekonomi berbeda.

Istilah "ekonomi politik" beralih dari "ekonomi" ketika konsep ekonomi politik muncul pada abad ke-18. "Ekonomi politik" mengacu pada manajemen ekonomi sebuah negara, sedangkan "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani yang berarti manajemen rumah tangga. Ketika ilmu ekonomi politik muncul, ada perdebatan tentang apa yang harus dilakukan oleh pejabat negara yang berkaitan dengan negara dan bermaksud membantu orang dalam memahami dan mengatasi perubahan besar dalam sistem pemusatan kebutuhan manusia, baik dengan memahami sifat kebutuhan dan keinginan serta cara membuat dan mendistribusikan barang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Caporaso dan Levine menyatakan bahwa ada dua pemahaman umum tentang ekonomi. Pertama, Alfred Marshall memberikan definisi

dalam bukunya *Principles of Economics*, yang ditulis tahun 1930. Dia berpendapat bahwa ilmu ekonomi (ekonomi) adalah studi tentang aktivitas sehari-hari manusia. Ini adalah bidang ekonomi yang mempelajari bagian dari tindakan individu dan tindakan sosial. Pencarian dan pemanfaatan kebutuhan material dan kesejahteraan adalah yang paling erat terkait dengan topik ini.

Lionel Robbins membuat definisi kedua dalam karyanya, *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, yang ditulis pada tahun 1932. Robbins menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah bidang yang menyelidiki perilaku manusia sebagai "hubungan antara tujuan dan sumber daya yang langka dan dapat "digunakan untuk berbagai macam keperluan."

Menurut Caporaso dan Levine, definisi Marshall selaras dengan anggapan bahwa kegiatan ekonomi terdiri dari penyediaan sarana fisik untuk memenuhi "kebutuhan". Di sisi lain, definisi ekonomi Robbins dipahami secara lebih abstrak dan lebih berfokus pada penyesuaian metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena ekonomi tidak mengacu pada tindakan tertentu, tetapi pada cara menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Dua kata "politik" dan "ekonomi" adalah etimologi dari istilah "ekonomi politik". Bahasa Yunani "oikos" artinya "rumah" dan "nomos" artinya "aturan", jadi "ekonomi" berarti "manajemen rumah tangga".

Dalam hal politik, kata "polis" berasal dari kata "kota/negara". Oleh karena itu, ekonomi politik adalah pengelolaan urusan ekonomi negara. Bruno S. Frey (1994) mengatakan bahwa ekonomi politik adalah kumpulan teori yang mencakup pemahaman tentang hubungan antara ekonomi dan politik. Dalam hal pembagian sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi, ekonomi dan politik berhubungan satu sama lain dalam berbagai cara. Politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan.

Para pengambil keputusan di bidang ekonomi dan politik bergantung satu sama lain, dan keduanya merupakan aktor utama dalam sistem ekonomi politik. Pandangan ekonomi politik berbeda dari ekonomi murni. Oleh karena itu, Caporaso mengatakan bahwa ekonomi politik tidak dapat lagi dianggap sebagai gabungan dari dua disiplin studi yang berbeda ketika ilmu politik dan ekonomi secara konseptual disatukan.

Oleh karena itu, secara umum, kajian ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, termasuk aspek, proses, dan institusi, dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat atau yang dibuat oleh pemerintah. Metode ini menempatkan bidang politik di bawah ekonomi. Ini berarti bahwa instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan menggunakan setting politik tempat kebijakan ekonomi atau peristiwa terjadi. Ilmu ekonomi politik mempelajari

penggunaan. Sistem kekuasaan dan pemerintahan sebagai alat dan instrumen untuk mengatur sistem ekonomi dan kehidupan sosial. Baik pendekatan politik maupun ekonomi tidak dapat melakukan proses ekonomi melalui pendekatan setting politik ini. Fokus studi ekonomi politik adalah fenomena ekonomi secara keseluruhan, yang terus dipelajari dan difokuskan pada hubungan antara faktor ekonomi dan faktor lain.

Pendekatan ekonomi politik menawarkan kerangka analitis untuk memahami hubungan antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam konteks pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Menurut North (1990), institusi politik memainkan peran penting dalam menentukan struktur ekonomi suatu negara, karena kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat menciptakan insentif atau hambatan bagi aktivitas ekonomi. Dalam konteks perusahaan daerah, pendekatan ini membantu menjelaskan pengaruh antara koneksi politik dapat memengaruhi efisiensi dan kinerja perusahaan. Olson (1993:4) menambahkan bahwa hubungan erat antara politik dan ekonomi sering kali menciptakan peluang untuk praktik *rent seeking*, di mana aktor politik atau ekonomi menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dalam perkembangan literatur ekonomi politik, terdapat pemahaman bahwa negara memiliki peran ganda dalam perekonomian, yaitu sebagai regulator dan sebagai fasilitator. Regulasi

yang dibuat oleh pemerintah sering kali dirancang untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam pasar, tetapi pada saat yang sama, negara juga dapat menjadi alat bagi kelompok kepentingan tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Bardhan (1984) menyebut fenomena ini sebagai "ekonomi politik negara berkembang", di mana institusi negara cenderung lebih rentan terhadap pengaruh kelompok elit dibandingkan dengan negara maju.

Pendekatan ekonomi politik juga menyoroti pentingnya distribusi kekuasaan antara berbagai aktor dalam perekonomian. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memiliki peran yang saling memengaruhi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, ketimpangan distribusi kekuasaan ini sering kali menjadi akar dari berbagai masalah ekonomi dan sosial. Misalnya, perusahaan daerah yang memiliki koneksi politik cenderung mendapatkan keuntungan yang tidak seimbang dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak memiliki akses serupa.

Teori ekonomi politik juga relevan dalam menjelaskan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi. Menurut Manor (1999:91), desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menciptakan risiko penyalahgunaan kekuasaan jika tidak disertai dengan mekanisme

pengawasan yang memadai. Dalam hal ini, perusahaan daerah sering kali menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan politik tertentu, yang dapat merugikan efisiensi operasional perusahaan tersebut.

Di sisi lain, pendekatan ekonomi politik juga menawarkan pandangan optimis bahwa hubungan yang sehat antara politik dan ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. North (1990) berargumen bahwa institusi politik yang stabil dan transparan dapat menciptakan kepercayaan di kalangan pelaku ekonomi, yang pada gilirannya mendorong investasi dan inovasi. Dalam konteks perusahaan daerah, ini berarti bahwa koneksi politik tidak selalu menjadi hambatan, tetapi dapat menjadi katalis bagi kemajuan jika dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pendekatan ini juga memberikan wawasan bahwa perusahaan daerah dapat memanfaatkan hubungan politik mereka untuk menciptakan nilai tambah. Misalnya, perusahaan yang memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan dapat mempercepat proses perizinan atau mendapatkan dukungan untuk proyek strategis. Namun, seperti yang diingatkan oleh Olson (1993:5), manfaat ini harus diseimbangkan dengan risiko ketergantungan yang berlebihan pada koneksi politik.

Dengan demikian, pendekatan ekonomi politik tidak hanya menawarkan kerangka untuk memahami masalah, tetapi juga

memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan manajemen perusahaan dalam mengelola hubungan politik-ekonomi secara strategis. Pendekatan penelitian ini akan menganalisis pengaruh dukungan politik terhadap kinerja badan usaha milik daerah di Sulawesi Selatan.

Kekuasaan negara, masyarakat, dan ekonomi makro merupakan tiga elemen yang saling berinteraksi dalam menentukan dinamika sosial-ekonomi suatu negara. Menurut Foucault (1991:194), kekuasaan negara tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan dan mengelola hubungan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi makro, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sambil memastikan distribusi sumber daya yang adil.

Hubungan antara negara dan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada. Di negara-negara berkembang, ketimpangan kekuasaan antara elit politik dan masyarakat umum sering kali menciptakan kebijakan yang tidak merata. Stiglitz (2002:23) berpendapat bahwa ketimpangan ini tidak hanya merugikan masyarakat bawah, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran negara menjadi krusial dalam mengatur hubungan antara berbagai

kelompok kepentingan untuk memastikan stabilitas dan inklusivitas ekonomi.

Perspektif ekonomi makro memberikan gambaran bahwa kebijakan negara dapat mempengaruhi masyarakat dan sektor ekonomi. Misalnya, kebijakan fiskal dan moneter yang dirancang oleh pemerintah memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan iklim investasi. Dalam hubungan ini, negara sering kali menghadapi dilema antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tuntutan untuk menjaga stabilitas sosial. Keynes (1936) menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur siklus ekonomi melalui intervensi yang tepat waktu dan efektif.

Dalam konteks perusahaan daerah, hubungan antara kekuasaan negara dan ekonomi makro menjadi semakin relevan. Perusahaan daerah sering kali berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyediakan layanan publik atau mengelola sumber daya strategis. Namun, peran ini sering kali disertai dengan tantangan, seperti tekanan politik untuk memenuhi agenda populis atau ketergantungan pada subsidi pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kontrol negara dan otonomi perusahaan untuk memastikan keberlanjutan operasional mereka.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan memengaruhi kebijakan negara. Dalam teori demokrasi ekonomi, masyarakat dianggap sebagai pemegang saham

utama dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam hubungan antara negara, masyarakat, dan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan mekanisme partisipasi, mereka dapat lebih efektif dalam menuntut kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

Hubungan ini menjadi semakin kompleks dalam era globalisasi, di mana ekonomi makro suatu negara sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, fluktuasi harga komoditas internasional atau perubahan kebijakan perdagangan global dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi domestik. Dalam konteks ini, negara perlu bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk merespons tantangan global dengan strategi yang adaptif dan inklusif.

Kerangka ini memberikan landasan untuk memahami dinamika antara kekuasaan negara, masyarakat, dan ekonomi makro memengaruhi kinerja badan usaha milik daerah. Dengan menganalisis hubungan ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keberhasilan perusahaan daerah di Sulawesi Selatan.

Institusi negara memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kinerja badan usaha milik daerah. Sebagai entitas yang sering kali beroperasi dalam kerangka regulasi pemerintah, perusahaan daerah

memiliki hubungan yang erat dengan institusi negara. Scott (2001) menyatakan bahwa institusi formal, seperti regulasi, dan institusi informal, seperti norma budaya, memiliki pengaruh besar terhadap perilaku organisasi. Dalam konteks perusahaan daerah, regulasi pemerintah dapat memberikan arah yang jelas, tetapi juga dapat menciptakan hambatan jika tidak dikelola dengan baik.

Perusahaan daerah sering kali bergantung pada dukungan dari institusi negara untuk mengakses sumber daya strategis, seperti pendanaan, proyek infrastruktur, dan perizinan. Di Indonesia, misalnya, perusahaan daerah yang memiliki koneksi politik sering kali mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran daerah. Namun, hubungan ini juga dapat menciptakan ketergantungan yang berlebihan, yang pada akhirnya mengurangi kemandirian perusahaan.

Hubungan ini juga mencerminkan dinamika antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi. Desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal, termasuk perusahaan daerah. Namun, desentralisasi juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam hal ini, perusahaan daerah dapat menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan politik jangka pendek, yang sering kali bertentangan dengan prinsip efisiensi ekonomi.

Dengan menganalisis hubungan antara institusi negara dan perusahaan daerah, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang arah kebijakan dan regulasi dapat disesuaikan untuk mendukung keberlanjutan perusahaan daerah tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Institusi negara juga berperan dalam menciptakan lingkungan regulasi yang memungkinkan perusahaan daerah untuk bersaing secara adil di pasar. Ketika institusi negara gagal dalam perannya sebagai regulator yang netral, perusahaan daerah sering kali menjadi korban dari regulasi yang tidak konsisten atau berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi institusi negara untuk terus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola perusahaan daerah agar tetap kompetitif dan berkelanjutan.

2. Ekonomi Politik Pendekatan Marxian

Pendapat bahwa negara bertindak sebagai pelaksanaan kepentingan individu kaum kapitalis dan masing-masing ditolak dalam teori Marxian. Negara dianggap memiliki kepentingan ideologis. Kepentingan negara didasarkan pada pemahaman tentang struktur masyarakat dan cara mempertahankan kohesi sosial sehingga memungkinkan individu-individu di dalamnya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi dalam jangka panjang. Mempertahankan tatanan sosial tertentu adalah tujuan negara.

Dengan tujuan untuk membuktikan bahwa cara kerja dari perekonomian kapitalis membawa dampak politik, Marx mengajukan kritik terhadap pandangan klasik tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Ia melakukan kritik bukan untuk membenarkan konsep kapitalisme yang dikendalikan negara, melainkan untuk menunjukkan bahwa tidak dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Ekonomi politik Marx bersumber pada ajaran-ajaran ekonomi politik klasik Inggris, terutama dasar-dasar teori nilai kerja yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Marx membangun teorinya bahwa krisis umum kapitalisme itu tidak terhindarkan dan bahwa sistem kapitalisme harus disingkirkan dan digantikan oleh sistem sosialis.

Kritik ekonomi politik Marxian terhadap kapitalisme sebagai sistem ekonomi pasar. Marx percaya bahwa pilar kelembagaan kapitalisme sangat eksploitatif karena menempatkan tenaga kerja subordinat di depan pemilik modal. Dalam kapitalisme, pranata-pranata faktor produksi adalah kelembagaan yang mengatur hubungan antara pemilik modal, tanah, dan tenaga kerja. Mereka muncul lebih lambat daripada kemajuan teknologi dalam produksi.

Caporaso dan Levine menilai cara pandang Marx dalam memandang hubungan antara agenda politik dan faktor-faktor ekonomi. Marx dipandang tetap berpegang pada pemahaman klasik bahwa ekonomi merupakan bidang tersendiri dalam kehidupan masyarakat

yang terpisah dari bidang-bidang lain, tetapi Marx mengajukan konsep yang berbeda dari pemikir-pemikir klasik lain tentang hubungan antara bidang politik dan bidang ekonomi.

Marx melihat komoditas sebagai "bentuk sel" masyarakat kapitalis: itu adalah barang yang bermanfaat bagi orang lain tetapi memiliki nilai jual bagi pemiliknya. Karena transaksi komersial tidak membutuhkan moralitas tertentu selain yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Pada awalnya, ekonomi politik dianggap sebagai suatu "ilmu moral" yang hanya berurusan dengan pembagian kekayaan yang adil atau sebagai suatu "aritmetika politik" untuk mengumpulkan pajak. Namun, sekarang telah dikalahkan oleh disiplin ilmu ekonomi, hukum, dan etika yang berbeda.

Marx percaya bahwa para ahli ekonomi politik dapat mempelajari hukum-hukum kapitalisme secara "objektif" karena perluasan pasar telah mengobjektivisasikan sebagian besar hubungan ekonomi: nexus uang telah menghapus semua ilusi politik dan keagamaan yang pernah ada, dan telah digantikan dengan ilusi jenis lain fetisisme komoditas. Selain itu, Marx menyatakan bahwa ia memandang "formasi ekonomi masyarakat sebagai suatu proses sejarah alam", menggambarkan pertumbuhan perdagangan sebagai proses yang tidak dapat diatur dan menghasilkan jaringan sosial yang kompleks dan tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, suatu "masyarakat" terbentuk "secara ekonomi" sebelum individu secara sadar menguasai kapasitas produktif yang

sangat besar dan hubungan yang mereka bangun, yang dibangun secara kolektif untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, analisis Marx berpusat pada kontradiksi struktural daripada antagonisme kelas. Antagonisme kelas merupakan ciri khas masyarakat kapitalis dan merupakan dasar dari "gerakan kontradiktif", juga dikenal sebagai *gegensätzliche Bewegung*. Gerakan ini berasal dari sifat ganda pekerjaan, bukan dalam konflik antara tenaga buruh dan modal atau antara kelas pemilik dan kelas pekerja. Selain itu, kontradiksi ini berfungsi "di belakang punggung" baik kaum kapitalis maupun buruh, seperti yang digambarkan oleh Marx dengan menggunakan frasa yang diambil dari Hegel. Dengan kata lain, sebagai hasil dari aktivitas mereka, tetapi tidak dapat ditanamkan ke dalam pikiran mereka baik sebagai individu maupun sebagai kelas. Oleh karena itu, *das Kapital* tidak menyarankan teori revolusi yang dipimpin oleh kelas buruh dan wakil-wakilnya; sebaliknya, dia menyarankan teori krisis sebagai kondisi untuk revolusi yang mungkin, atau apa yang Marx sebut sebagai "senjata" potensial dalam Manifesto Komunis.

Banyak pendukung yang sering menyatakan bahwa salah satu kekuatan utama metode saintifik adalah fokus eksplorasi atas predeterminasi. Mereka menjelaskan bahwa keberhasilan metode saintifik berasal dari ketaatan pada eksplorasi rasional yang terbuka, bukan dari kesimpulan atau prediksi yang telah ditentukan dari teoretikus Marxis. Kaum sosialis libertarian percaya bahwa pendekatan

metodologis eksplorasi adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan sosial, meskipun banyak kritikus mengatakan bahwa mereka menghindari pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab. Mereka percaya bahwa metode organisasi sosial yang dogmatik tidak akan berhasil. Oleh karena itu, menolak konsep "sejarah" yang linear. "Aku seorang anarkis bukan karena aku memercayai anarkisme adalah tujuan akhir, melainkan karena tidak ada yang namanya tujuan akhir" (The London Years, 1956).

3. Ekonomi Politik Liberal Klasik

Ilmuwan masa lalu berpendapat bahwa politik dan ekonomi terkait erat. Dalam buku *Politiknya*, filsuf Yunani Aristoteles mengatakan bahwa ilmu politik terdiri dari ilmu ekonomi. Politik adalah etika atau falsafah, dan ekonomi berasal dari kata "eikos", yang berarti "aturan" atau "tata cara", dan "nomos", yang berarti "rumah tangga." Pada masa praklasik, ilmu ekonomi politik juga diartikan sebagai seni mengolah rumah tangga negara. Akibatnya, ilmu ekonomi politik banyak diartikan sebagai ilmu tentang etika atau falsafah yang digunakan untuk mengelola negara menuju masyarakat yang sejahtera secara sosial dan makmur secara ekonomi.

James Steuart Mill memperkuat pemikiran praklasik ini dalam bukunya *An Inquiry Into the Principles of Political Economy* (1767), di mana ekonomi lebih luas daripada politik. Politik mengatur negara, sedangkan ekonomi hanya mengatur rumah tangga. Pandangan

Steuart bahwa ekonomi merupakan bagian dari ilmu politik secara implisit menunjukkan bahwa ekonomi harus dimasukkan ke dalam struktur politik yang lebih makro. Dalam tradisi filsuf Yunani, gagasan ini dianggap sebagai patron kenegaraan. Salah satu Plato percaya bahwa individu adalah bagian dari kelompok besar. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada kelompok besar karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam hal ekonomi, ia berpendapat bahwa kekayaan pribadi atau privat harus dihapus karena akan menimbulkan masalah sosial, yaitu kejahatan dalam kehidupan sosial.

Plato, dalam bukunya yang berjudul Republik, menjelaskan bahwa pertikaian tidak bisa dihindari dalam kelompok masyarakat jika muncul kepemilikan kekayaan dalam tataran perseorangan. Dalam konteks politik, Plato tidak percaya dengan demokrasi. Menurutnya, tidak mungkin memberikan hak suara bagi orang per orang karena tidak semua orang atau individu mengetahui hal-hal yang terbaik bagi masyarakat. Hanya kalangan filsuf yang mengetahui hal-hal terbaik dalam masyarakat karena mereka memiliki kemampuan dan ilmu, sedangkan masyarakat dan individu-individunya masih perlu dididik.

Dalam bukunya yang berjudul Republik, Plato membagi tiga kelas masyarakat pembagi kerja, yakni:

1. Rulers (pengatur): raja, ilmuwan
2. Auxiliartis (pelaksana): tentara, polisi, dan pamong praja
3. Workers (pekerja).

Dalam pembagian kelompok kerja tersebut, menurut Plato, para raja dan ilmuwan sebagai pihak penentu kerja dua kelompok di bawahnya. Plato pun menyimpulkan bahwa negara akan ideal dan dapat berkembang jika dipimpin oleh para raja atau ilmuwan karena memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi daripada masyarakat secara individu. Dalam konteks ekonomi, kekayaan lebih lazim dimiliki oleh raja dan ilmuwan sehingga dalam kajian politik kenegaraan, kekayaan harus dikuasai oleh negara. Hal ini karena sumber daya yang ada dapat didistribusikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan semuanya. Pada akhirnya, konflik, kekacauan yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi di tingkat horizontal tidak terjadi.

Hingga abad ke-14 pemikiran Plato menjadi dasar kenegaraan. Pada abad ini definisi ekonomi politik berkembang seiring dengan terjadinya Revolusi Perancis seri I, yang ditandai terjadinya transisi kekuasaan dari raja, gereja, kepada kaum saudagar (merchant). Era inilah oleh kalangan ilmuwan masa kini disebut sebagai era merkantilisme. Era ini memiliki persepsi bahwa untuk memajukan suatu negara dapat diperoleh dari surplus ekspor dan impor. Era ini mengagungkan perdagangan dan perniagaan. Dalam kajian ekonomi politik, aliran ini merupakan aliran pertama yang menghendaki campur tangan negara untuk membangun perekonomian negara. Campur tangan pada era ini, yaitu:

1. Memberikan fasilitas kepada industri yang baru tumbuh

2. Membangun kebijakan monopoli
3. Memberlakukan pajak impor untuk produk penting dalam nilai yang tinggi sehingga tidak memungkinkan barang tersebut menguasai wilayah pasar suatu negara.

Tujuan campur tangan pemerintah ini adalah memperbesar surplus karena model transaksi pada masa ini menggunakan alat tukar batangan emas sehingga jika terjadi surplus, negara akan kaya. Kritik dalam era merkantilisme ada pada: (1) hasil niaga hanya dinikmati oleh para saudagar yang berkolaborasi dengan penguasa; (2) kebijakan pemerintah tidak dinikmati oleh petani yang hidup dalam keadaan tekanan; (3) potensi konflik antarnegara lebih mengemuka.

4. Ekonomi Politik Neoklasik

Dari sudut pandang neoklasik, fokus ekonomi politik neoklasik adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengejar keuntungan pribadi. Dianggap bahwa pendekatan neoklasik muncul bersamaan dengan munculnya aliran marginalis dalam bidang ekonomi pada tahun 1870-an. Sebelum tahun 1970, teori nilai dan tenaga kerja mendominasi pemikiran ilmu ekonomi. Agenda ini mengalami perubahan setelah dekade 1870-an, tetapi tidak terlalu besar. Dalam ekonomi politik klasik, pasar dipandang sebagai sistem yang terdiri atas transaksi-transaksi yang dilakukan secara sukarela antara beberapa pemilik properti yang independen, yang sama-sama mengejar kepentingan masing-masing.

Aliran neoklasik ini secara sederhana dibedakan atas dua generasi. Generasi pertama banyak memperbaiki teori-teori ekonomi klasik. Generasi kedua memiliki pandangan sendiri terhadap pasar. Para pakar ekonomi neoklasik generasi pertama dibedakan lagi atas dua kelompok, yaitu kelompok Austria karena hampir semua pendukungnya, seperti Carl Menger, Friedrich von Wieser, dan Eugen von Böhm-Bawerk berasal dari Austria. Pada saat itu ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat di tangan para pakar neoklasik dari Austria. Kedua adalah kelompok ekonomi Cambridge karena para pendirinya seperti Alfred Marshall dan pendukungnya berasal dari University of Cambridge.

Pada tahun 1930-an, Piero Sraffa, Joan Violet Robinson, dan Edward Chamberlin memimpin gerakan neoklasik ekonomi politik generasi kedua. Perbedaan antara pakar ekonomi klasik dan neoklasik adalah bahwa yang pertama menganggap pasar sebagai tempat persaingan sempurna, sedangkan yang kedua menganggap pasar sebagai tempat persaingan yang tidak sempurna, di mana monopoli, oligopoli, atau kompetisi dapat terjadi. Dalam model pasar persaingan sempurna, ada banyak penjual dan pembeli, dan tidak ada pelaku ekonomi seperti produsen, perusahaan, atau konsumen yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga pasar. Sebaliknya, dalam model pasar persaingan tidak sempurna, ada sedikit penjual. Selain itu, dalam sistem monopoli, hanya satu perusahaan yang dapat mengendalikan

semua permintaan konsumen. Kapasitas untuk memperoleh keuntungan ekonomi meningkat seiring dengan penurunan jumlah perusahaan. Ini berdampak pada harga pasar.

Berdasarkan uraian sebelumnya, jelas bahwa landasan teori yang digunakan dalam perspektif ekonomi politik neoklasik jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perspektif ekonomi politik klasik. Menurut Grindle (1989), teori ekonomi politik dibedakan atas dua kelompok: (1) pendekatan terpusat ke masyarakat, dan (2) pendekatan terpusat ke negara.

1. Hak Kepemilikan

Dalam pendekatan neoklasik, hak kepemilikan memegang peran sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir para ekonom neoklasik yang membahas hak kepemilikan, memandang hak ini bukan hanya sebagai bagian dari kerangka yang mendasari kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari sistem hukum yang dibentuk melalui sistem ekonomi.

Hak kepemilikan (*property rights*) adalah hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan. Kekayaan (*property*) adalah properti dalam artian fisik, yaitu konsumsi, mesin, dan tanah. Tenaga kerja adalah hak kepemilikan juga. Ada dua teori tentang hak kepemilikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori positivis. Bagi positivis, hak kepemilikan dapat dianggap bersifat politik karena hak adalah hasil dari proses politik sehingga hak

kepemilikan boleh diganggu gugat sama halnya dengan hal politik lainnya.

- b. Hak kepemilikan tidak statis. Hak kepemilikan merujuk pada sebuah kondisi awal yang menjadi syarat bagi terjadinya hubungan pertukaran, tetapi sifat dan jangkauan hak kepemilikan bisa berubah pada perkembangan selanjutnya.

2. Eksternalitas

Eksternalitas adalah dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) yang tidak melewati sistem harga dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau perusahaan lain (Rhoads, 1985: 113). Dalam pasar, semua transaksi bersifat pribadi. Jika ada pihak ketiga yang dilibatkan di dalamnya, pihak ketiga ini biasanya diberi imbalan atau dikenakan biaya. Semua biaya yang ditanggung oleh produsen sama dengan biaya yang ditanggung oleh masyarakat, dan keuntungan yang didapat oleh produsen sama dengan keuntungan yang didapat oleh masyarakat.

Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas dengan cara denda dan subsidi melalui harga, regulasi pemerintah dengan melakukan standar dan ancaman hukuman.

5. Konseptualisasi Dukungan Politik

Konsep dukungan politik merujuk pada hubungan strategis antara aktor politik dan entitas ekonomi, di mana dukungan tersebut

mencakup bantuan regulasi, alokasi sumber daya, dan pengaruh kebijakan. Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memperoleh keuntungan, seperti akses pendanaan yang lebih mudah, kemudahan dalam perizinan, dan proyek-proyek pemerintah yang strategis (Faccio, 2006: 369-386). Dalam konteks perusahaan daerah, dukungan politik sering kali menjadi alat untuk mencapai efisiensi dan peningkatan daya saing. Namun, hubungan ini juga menghadirkan tantangan, terutama ketika dukungan politik menyebabkan ketergantungan yang merugikan perusahaan.

Perusahaan daerah, sebagai entitas yang sering kali berada di bawah pengawasan langsung pemerintah daerah, memiliki hubungan yang erat dengan aktor politik. Hubungan ini dapat memberikan manfaat berupa pengurangan biaya operasional, prioritas dalam pengalokasian proyek, dan stabilitas jangka pendek. Akan tetapi, penelitian Bliss dan Gul (2012) menunjukkan bahwa dukungan politik juga dapat meningkatkan risiko finansial perusahaan, terutama jika keputusan bisnis didasarkan pada pertimbangan politik daripada analisis ekonomi yang rasional (Bliss & Gul, 2012: 117-142).

Dukungan politik terhadap perusahaan daerah dapat dilihat sebagai bentuk kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Olson (1993) menyatakan bahwa kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi positif jika dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Olson,

1993: 567-582). Namun, ketika hubungan tersebut didominasi oleh kepentingan politik, perusahaan daerah sering kali menghadapi tekanan untuk memenuhi agenda politik tertentu yang tidak selalu selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Ketergantungan perusahaan daerah terhadap dukungan politik tidak terlepas dari struktur kelembagaan dan regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan dunia usaha. Dalam banyak kasus, perusahaan daerah bergantung pada dukungan politik karena keterbatasan modal dan sumber daya yang dikendalikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan yang menentukan keberlangsungan operasional perusahaan sering kali berubah seiring dengan dinamika politik. Hal ini menciptakan situasi di mana perusahaan daerah harus terus melakukan lobi politik untuk memastikan akses terhadap pendanaan dan proyek strategis.

Political Economy of Institutions (North, 1990) menjelaskan bahwa regulasi yang tidak stabil menyebabkan ketidakpastian bagi dunia usaha (North, 1990: 81-95). Dalam sistem ekonomi yang sehat, institusi politik seharusnya memberikan kerangka yang jelas bagi perusahaan untuk berkembang secara mandiri. Namun, dalam konteks PT SCI, kebijakan penyertaan modal dan perubahan direksi sering kali bergantung pada kepentingan politik, bukan pada analisis bisnis yang rasional. Hal ini memperlihatkan bagaimana kelembagaan yang tidak

efektif dapat memaksa perusahaan untuk bergantung pada hubungan politik.

Public Choice Theory (Buchanan & Tullock, 1962) mengkritik pendekatan kelembagaan dengan menyoroti bahwa bukan hanya kelembagaan yang menciptakan ketergantungan ini, tetapi juga perilaku individu dalam birokrasi dan politik. Aktor politik sering kali menggunakan penyertaan modal dan regulasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan (Buchanan & Tullock, 1962: 45-60). Dalam konteks PT SCI, dukungan politik yang diberikan tidak selalu bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, melainkan untuk memperkuat posisi aktor politik yang berkuasa. Pergantian kepemimpinan daerah sering kali berujung pada perubahan kebijakan yang berdampak langsung pada strategi bisnis perusahaan daerah.

Pendekatan ini dikritik oleh Rent-Seeking Theory (Krueger, 1974), yang berpendapat bahwa perusahaan daerah tidak hanya menjadi korban dari intervensi politik, tetapi juga secara aktif mencari keuntungan dari hubungan dengan aktor politik (Krueger, 1974: 291-303). Dalam banyak kasus, perusahaan daerah lebih memilih untuk mempertahankan kedekatan dengan pemerintah daerah dibandingkan dengan meningkatkan daya saingnya di pasar. PT SCI, misalnya, lebih mengandalkan akses politik untuk memperoleh proyek strategis daripada melakukan diversifikasi bisnis yang lebih kompetitif. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dukungan politik bukan

hanya disebabkan oleh regulasi yang lemah, tetapi juga oleh insentif yang mendorong perusahaan untuk mencari rente politik.

Dari sudut pandang ekonomi liberal, Adam Smith (1776) dan Hayek (1944) mengkritik semua bentuk ketergantungan pada negara. Mereka menegaskan bahwa perusahaan seharusnya beroperasi secara mandiri dengan aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah berdasarkan dinamika politik. Pemerintah seharusnya hanya berfungsi sebagai regulator yang memastikan bahwa pasar beroperasi dengan adil dan efisien. Namun, kritik terhadap pendekatan ini menyoroti bahwa dalam banyak negara berkembang, perusahaan daerah tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama dengan perusahaan swasta, sehingga tetap memerlukan dukungan dari pemerintah daerah.

Dalam sistem ekonomi yang lebih liberal, perusahaan daerah seharusnya mampu bersaing dengan swasta tanpa memerlukan intervensi politik. Namun, dalam kenyataannya, banyak perusahaan daerah yang tetap membutuhkan regulasi yang memberikan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, meskipun ekonomi politik liberal menekankan pentingnya kompetisi pasar, ada kebutuhan untuk menciptakan regulasi yang memastikan bahwa perusahaan daerah tetap dapat berkembang tanpa harus bergantung secara berlebihan pada dukungan politik.

Dukungan politik terhadap perusahaan daerah tidak hanya terbentuk melalui regulasi dan alokasi anggaran, tetapi juga melalui

mekanisme implementasi kebijakan yang kompleks. *Political Economy of Institutions* (North, 1990) menjelaskan bahwa dukungan politik terhadap BUMD sering kali diberikan melalui proses legislasi dan kebijakan eksekutif yang menentukan arah bisnis perusahaan daerah (North, 1990: 105-120). Dalam konteks PT SCI, dukungan politik tercermin dalam bentuk regulasi terkait penyertaan modal, keputusan alokasi anggaran daerah, serta pemberian izin usaha dan hak pengelolaan aset strategis.

Public Choice Theory (Buchanan & Tullock, 1962) lebih jauh menguraikan bahwa proses dukungan politik sering kali melibatkan negosiasi antara aktor politik dan pihak manajemen perusahaan (Buchanan & Tullock, 1962: 85-100). Legislatur dan eksekutif daerah cenderung memberikan dukungan politik kepada perusahaan daerah berdasarkan perhitungan kepentingan politik mereka sendiri. Dalam kasus PT SCI, hubungan antara direksi perusahaan dan aktor politik daerah mempengaruhi sejauh mana dukungan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dapat dikonversi menjadi kebijakan konkret yang mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

Pendekatan Rent-Seeking Theory (Krueger, 1974) menyoroti bahwa dalam proses dukungan politik terhadap perusahaan daerah, terdapat kecenderungan bagi manajemen perusahaan untuk aktif mencari keuntungan dari hubungan dengan aktor politik (Krueger, 1974: 291-303). Hal ini dapat dilakukan melalui lobi politik yang

bertujuan untuk mendapatkan proyek strategis, kemudahan regulasi, atau akses terhadap dana publik. Dalam kasus PT SCI, ketergantungan terhadap aktor politik bukan hanya bersifat pasif, tetapi juga merupakan strategi bisnis untuk mendapatkan dukungan dalam menghadapi persaingan dengan sektor swasta.

Dengan memahami bagaimana proses dukungan politik dijalankan dalam mendukung kinerja badan usaha milik daerah, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis BUMD serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan daerah.

6. *Bargaining Position* dalam Politik

Bargaining position dalam politik merujuk pada kemampuan aktor atau kelompok politik untuk memengaruhi pengambilan keputusan dan negosiasi dalam konteks politik tertentu. Konsep ini berakar pada teori negosiasi hubungan kekuasaan, di mana setiap aktor memiliki kapasitas tertentu untuk memengaruhi hasil berdasarkan sumber daya, posisi strategis, dan konteks yang dihadapi. Dalam konteks politik, *bargaining position* mencakup kekuatan negosiasi yang dimiliki oleh partai politik, individu, atau kelompok kepentingan dalam meraih tujuan politik tertentu.

Secara teori, *bargaining position* dapat dipahami melalui pendekatan *power dynamics*. Menurut Emerson (1962), kekuatan

bargaining tergantung pada ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika satu pihak memiliki sumber daya yang penting bagi pihak lain, maka *bargaining position* mereka akan meningkat. Dalam politik, sumber daya ini bisa berupa dukungan suara, akses terhadap media, atau kontrol atas kebijakan publik. Oleh karena itu, bargaining position sangat dinamis dan dapat berubah tergantung pada konteks tertentu yang melibatkan distribusi kekuasaan dan ketergantungan actor.

Legitimasi dan dukungan publik menjadi aspek penting dalam memperkuat bargaining position. Menurut Lukes (2005), kekuasaan dalam politik tidak hanya mencakup kemampuan untuk memengaruhi keputusan tetapi juga membentuk persepsi publik yang mendukung. Dengan legitimasi yang kuat, aktor politik dapat meningkatkan bargaining position mereka, terutama dalam menghadapi tekanan atau persaingan politik. Dukungan dari masyarakat sering kali menjadi dasar yang memperkuat posisi negosiasi mereka.

Proses pembentukan koalisi politik menjadi contoh konkret dari bargaining position yang dimainkan oleh berbagai aktor. Dalam sistem multipartai, partai kecil dengan suara signifikan sering menjadi "*kingmaker*" karena mereka dapat menentukan pembentukan pemerintahan. Menurut Laver dan Schofield (1990), situasi ini mencerminkan pentingnya bargaining position yang bergantung pada nilai strategis dari dukungan yang mereka tawarkan, terlepas dari ukuran partai tersebut.

Kemampuan membangun jaringan dan aliansi menjadi faktor penentu lain dalam bargaining position politik. Putnam (1988) menyatakan bahwa dalam negosiasi internasional, aktor domestik yang didukung oleh aliansi eksternal sering memiliki bargaining position yang lebih kuat. Hal ini berlaku pula dalam politik domestik, di mana membangun aliansi lintas kelompok atau partai dapat meningkatkan pengaruh aktor dalam proses pembuatan kebijakan.

Kondisi ekonomi dan sosial juga berperan signifikan dalam menentukan bargaining position. Dalam krisis ekonomi, misalnya, pemerintah cenderung memiliki posisi yang lebih lemah dalam menghadapi tuntutan dari kelompok kepentingan seperti serikat pekerja. Acemoglu dan Robinson (2012) menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya sering kali menjadi faktor struktural yang memengaruhi bargaining position berbagai aktor politik.

Dalam konteks hubungan antara pemerintah daerah dan pusat, bargaining position sering kali dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan mendapatkan dukungan politik dari tingkat nasional. Smoke (2003) mencatat bahwa legitimasi lokal, ditambah dengan dukungan aktor nasional, sering kali menjadi kombinasi yang menentukan keberhasilan negosiasi antara kedua tingkat pemerintahan ini.

Aspek budaya dan historis juga memainkan peran dalam menentukan bargaining position. Dalam masyarakat tradisional,

pemimpin adat atau kelompok etnis tertentu sering memiliki posisi yang kuat karena legitimasi yang berasal dari tradisi dan sejarah mereka. Geertz (1973) mencatat bahwa dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh simbolisme budaya, nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat menjadi kunci dalam membentuk posisi negosiasi mereka.

Peran teknologi dan media dalam politik modern tidak dapat diabaikan. Aktor politik yang mampu menggunakan media sosial secara efektif dapat meningkatkan bargaining position mereka melalui kampanye digital yang strategis. Chadwick (2013) mencatat bahwa penguasaan narasi di media sosial sering memberikan keuntungan besar dalam negosiasi politik, terutama dalam konteks di mana opini publik menjadi faktor utama.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, bargaining position dalam politik adalah konsep yang kaya dan memerlukan pemahaman mendalam. Interaksi antara sumber daya, legitimasi, dukungan publik, aliansi strategis, dan faktor ekonomi serta sosial membuat konsep ini relevan untuk menganalisis dinamika kekuasaan dalam berbagai konteks politik.

7. *Interest Group Theory*

Kelompok kepentingan (interest group) merupakan organisasi yang berupaya memengaruhi kebijakan publik guna mengamankan kepentingan tertentu. Dalam sistem politik, kelompok kepentingan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan yang

berkaitan dengan sektor ekonomi, sosial, maupun institusional. Secara umum, kelompok kepentingan dapat dikategorikan ke dalam lima jenis utama, yaitu kelompok kepentingan ekonomi, kelompok berbasis nilai atau isu sosial (cause groups), kelompok kepentingan publik, kepentingan institusional, serta kelompok non-asosiasional yang tidak memiliki struktur organisasi formal (Milojevich, 2014:2).

Parrilla, Almiron, dan Xifra (2016) dalam penelitian mereka yang berjudul *Crisis and Interest: The Political Economy of Think Tanks During the Great Recession*, yang diterbitkan dalam jurnal *American Behavioral Scientist*, menguraikan bahwa analisis terhadap kelompok kepentingan, khususnya lembaga pemikir (think tanks), umumnya berlandaskan pada dua teori utama, yaitu pluralisme dan elitisme. Mereka menjelaskan bahwa teori pluralisme, sebagaimana banyak dianut dalam literatur Anglo-Amerika, menggambarkan lembaga pemikir sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang dinamis, di mana berbagai kelompok bersaing untuk memengaruhi keputusan publik. Namun, perspektif elitis menekankan bahwa lembaga pemikir bukanlah aktor netral yang hanya bertujuan memajukan ilmu pengetahuan, melainkan alat bagi kelas kapitalis yang berkuasa untuk mempertahankan hegemoninya. Selain kedua teori tersebut, Parrilla et al. (2016:67) juga mengidentifikasi munculnya perspektif alternatif, seperti institusionalisme, neo-Marxisme, ekonomi politik kritis, serta

teori lapangan (field theory), yang semakin memperkaya pemahaman mengenai peran lembaga pemikir dalam ekonomi politik kontemporer.

Dalam literatur ekonomi politik, terdapat dua teori utama yang menjelaskan bagaimana kelompok kepentingan memengaruhi kebijakan publik, yakni teori pluralisme dan neo-korporatisme. Teori pluralisme berpendapat bahwa sistem politik idealnya bekerja seperti pasar kompetitif, di mana berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda bersaing untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Theodore Lowi (1979) mengemukakan bahwa persaingan yang terjadi dalam sistem pluralisme memungkinkan terciptanya keseimbangan dalam kebijakan publik, karena tidak ada satu kelompok yang mampu mendominasi secara absolut. Namun, dalam praktiknya, kelompok yang memiliki sumber daya besar dan akses langsung kepada pengambil kebijakan sering kali mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan kelompok yang lebih kecil dan kurang memiliki jaringan politik. Hal ini mengarah pada apa yang disebut sebagai elitisme pluralis, di mana kelompok tertentu yang memiliki koneksi dengan elite politik lebih berpeluang dalam menentukan kebijakan yang menguntungkan mereka (Milojevich, 2014:6)

Berbeda dengan pluralisme, teori neo-korporatisme menekankan kerja sama struktural antara pemerintah, bisnis, dan serikat pekerja dalam merancang kebijakan ekonomi. Model ini lebih terlihat dalam negara-negara seperti Jerman, Swedia, dan Austria, di

mana terdapat asosiasi puncak (peak associations) yang mampu menegosiasikan kepentingan berbagai sektor secara terstruktur. Dalam konteks ini, Schmitter (1974) menjelaskan bahwa neo-korporatisme bukan hanya sekadar negosiasi antara negara dan kelompok kepentingan, tetapi merupakan mekanisme koordinasi ekonomi yang lebih efektif dibandingkan pluralisme yang bersifat kompetitif. Meski demikian, kritik terhadap neo-korporatisme menyatakan bahwa model ini cenderung menguntungkan kelompok yang telah mapan dalam sistem, sementara kelompok-kelompok kecil sering kali tidak mendapatkan representasi yang memadai (Milojevich, 2014:6).

Menurut berbagai akademisi (misalnya, Medvetz, 2012; Pautz, 2011; Stone, 1996; Thomas, 2004), pluralisme dan elitisme merupakan dua teori dominan yang menjadi dasar utama dalam analisis kelompok kepentingan (lobi dan lembaga pemikir). Pendekatan pluralis telah menjadi pendekatan yang paling ortodoks dalam literatur Anglo-Amerika terkait peran kelompok kepentingan dalam demokrasi liberal (Thomas, 2004).

Kebanyakan kajian pluralis, proliferasi lembaga pemikir dianggap sebagai tanda kemajuan dalam demokrasi, para penulis yang mengadopsi perspektif elitis menekankan bahwa organisasi-organisasi ini bukanlah aktor netral yang tidak memiliki kepentingan, yang hanya didedikasikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, maupun bersaing secara setara dalam pembentukan kebijakan publik. Pendekatan

elitisme berakar pada tradisi teori elite yang dikemukakan oleh sosiolog politik Amerika, C. Wright Mills (1956). Dalam pandangan ini, para akademisi yang berpihak pada elitisme menganggap bahwa lembaga pemikir harus dianalisis sebagai alat dari kelas kapitalis yang berkuasa (Domhoff, 2010)

Selain pluralisme dan elitisme, beberapa teori lain juga muncul, di antaranya institusionalisme, neo-Marxisme, ekonomi politik, dan teori lapangan (field theory). Institusionalisme berfokus pada lingkungan (struktur, aturan, norma, dan proses) yang membentuk perilaku lembaga pemikir. Para institusionalis tidak menganggap bahwa kontrol sosial dan ekonomi oleh elite merupakan faktor utama dalam membentuk organisasi-organisasi ini. Meskipun mereka menilai bahwa kerangka kerja ini hanya memberi sedikit ruang bagi agensi atau independensi, mereka berpendapat bahwa lembaga pemikir tidak selalu berfungsi untuk kepentingan modal (Stone, 1996).

Perspektif neo-Marxis menganggap bahwa lembaga pemikir lebih merupakan hasil dari kesadaran kelas dibandingkan sekadar produk dari elite politik atau kesepakatan sosial (Thomas, 2004). Pendekatan ini menempatkan konflik kelas sebagai pusat dalam ekonomi politik Marxis. Dalam konteks ini, analisis Gramscian mengenai kontrol hegemonik menjadi relevan. Perspektif ini berpendapat bahwa aparatus ideologis membatasi parameter gagasan, perdebatan, dan wacana dalam masyarakat sipil serta negara

(Gramsci, 1971). Pautz, misalnya, menawarkan pemahaman neo-Gramscian mengenai lembaga pemikir. Ia menunjukkan bahwa jaringan kerja sama telah menjadi berpengaruh dalam pembuatan kebijakan; serta bahwa agensi, ide, hierarki kekuasaan, dan konteks memainkan peran penting dalam efektivitas lembaga pemikir dalam membentuk kebijakan (Pautz, 2011).

Kelompok kepentingan memiliki berbagai strategi untuk memengaruhi kebijakan publik, yang bervariasi tergantung pada sistem politik suatu negara. Dalam sistem demokrasi, kelompok kepentingan dapat melakukan lobi formal dengan pembuat kebijakan, memanfaatkan media untuk membentuk opini publik, serta memberikan dukungan finansial kepada kandidat politik yang dianggap sejalan dengan agenda mereka. Di Amerika Serikat, misalnya, keberadaan Political Action Committees (PACs) memungkinkan kelompok kepentingan untuk memberikan dana kampanye secara legal kepada kandidat yang mendukung kepentingan mereka. Namun, dalam sistem otoriter, strategi yang digunakan lebih bersifat informal dan sering kali bergantung pada hubungan personal dengan elite pemerintahan.

Selain faktor internal dari kelompok kepentingan itu sendiri, tingkat pengaruh yang mereka miliki juga sangat bergantung pada seberapa besar ketergantungan pemerintah terhadap kelompok tersebut. Pemerintah cenderung lebih responsif terhadap kelompok yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial.

Sebagai contoh, perusahaan multinasional yang memiliki investasi besar di suatu negara akan lebih mudah mendapatkan akses kebijakan dibandingkan kelompok masyarakat sipil yang berjuang untuk isu-isu tertentu seperti perlindungan lingkungan atau hak-hak pekerja migran. Howard Tolley (1990) menegaskan bahwa di tingkat internasional, kelompok kepentingan bahkan lebih vital dibandingkan partai politik dalam memengaruhi kebijakan global, karena mereka mampu bergerak melintasi batas negara dan memiliki agenda yang tidak terbatas pada kepentingan domestik semata.

Dengan semakin berkembangnya globalisasi, kelompok kepentingan diperkirakan akan semakin aktif dalam memengaruhi kebijakan di tingkat domestik maupun internasional. Meningkatnya interdependensi ekonomi antarnegara menyebabkan organisasi seperti WTO, IMF, dan PBB menjadi arena penting bagi kelompok kepentingan global dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Di masa depan, meskipun ada kecenderungan homogenisasi dalam organisasi dan strategi kelompok kepentingan, perbedaan dalam struktur politik, budaya, serta kondisi sosial-ekonomi masing-masing negara akan tetap menjadi faktor penentu dalam dinamika kelompok kepentingan dan pengaruhnya terhadap kebijakan publik.

Dalam memahami interaksi antara PT SCI dengan aktor politik, perlu digunakan Interest Group Theory atau Teori Kelompok Kepentingan digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan

daerah berfungsi sebagai kelompok kepentingan yang berupaya memengaruhi kebijakan pemerintah guna mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik (Olson, 1965). Dalam konteks PT SCI, teori ini relevan karena perusahaan daerah sering kali bertindak sebagai kelompok kepentingan yang menggunakan berbagai strategi untuk memastikan keberlanjutan usahanya melalui hubungan dengan aktor politik.

Menurut Interest Group Theory, kelompok kepentingan dapat beroperasi dalam berbagai bentuk, seperti lobi politik, koalisi strategis, dan keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam kasus PT SCI, perusahaan ini memiliki kepentingan langsung terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dan DPRD terkait regulasi bisnis, alokasi anggaran, serta penyertaan modal. Oleh karena itu, perusahaan sering kali melakukan pendekatan kepada aktor politik guna memastikan kebijakan yang mendukung kelangsungan operasional mereka.

Hubungan ini juga erat kaitannya dengan Bargaining Position, di mana PT SCI dapat meningkatkan daya tawarnya dengan membangun aliansi dengan aktor politik, memperkuat jaringan bisnis, serta mendapatkan legitimasi publik sebagai entitas ekonomi yang penting bagi daerah. Semakin besar pengaruh PT SCI dalam kebijakan daerah, semakin besar pula bargaining position yang dimilikinya dalam negosiasi politik dan ekonomi.

Dalam konteks Public Choice Theory, kelompok kepentingan seperti PT SCI sering kali tidak hanya berusaha mendapatkan dukungan politik untuk kepentingan bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam proses legislasi dengan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan. Namun, teori ini juga mengkritik bahwa interaksi antara kelompok kepentingan dan aktor politik dapat menciptakan konflik kepentingan yang mengarah pada pengambilan kebijakan yang tidak selalu berbasis pada kepentingan publik, tetapi lebih kepada kepentingan segelintir elite politik dan bisnis.

Interest Group Theory juga erat terkaitnya dengan Rent-Seeking Theory, yang menjelaskan bagaimana kelompok kepentingan dapat memanfaatkan hubungan dengan aktor politik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa meningkatkan produktivitas. Dalam kasus PT SCI, perusahaan dapat memanfaatkan hubungan dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan proyek strategis atau penyertaan modal yang seharusnya bersaing secara kompetitif di pasar terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan daerah yang terlalu bergantung pada hubungan politik berisiko mengembangkan strategi bisnis yang lebih berorientasi pada pencarian rente dibandingkan dengan peningkatan efisiensi dan inovasi.

Dengan Interest Group Theory, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana PT SCI membangun dan mempertahankan hubungan dengan aktor politik

sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memperkuat bargaining position-nya dalam sistem politik yang dinamis, serta bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh tekanan kelompok kepentingan dalam ekonomi politik lokal

8. Kinerja Perusahaan

Bernardin dan Russel (2003) memberikan pengertian kinerja (performance) sebagai berikut: “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period (Bernardin & Russel, 2003: 78-85). Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama waktu tertentu.

Menurut Yunanto (2008), kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo (Yunanto, 2008: 112-125).

Dalam perspektif Public Choice Theory, kinerja badan usaha milik daerah sering kali tidak hanya bergantung pada faktor bisnis internal, tetapi juga pada kepentingan politik yang membentuk regulasi

dan kebijakan perusahaan. Pemerintah daerah yang memiliki kepentingan politik tertentu dapat mempengaruhi strategi bisnis PT SCI dengan menentukan arah investasi, alokasi anggaran, serta keputusan penyertaan modal. Hal ini menimbulkan risiko bagi perusahaan, terutama ketika kebijakan yang diambil lebih berorientasi pada keuntungan politik jangka pendek dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pendekatan Rent-Seeking Theory menambahkan bahwa perusahaan daerah sering kali lebih fokus pada mempertahankan hubungan dengan aktor politik dibandingkan dengan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dalam kasus PT SCI, perusahaan yang memiliki akses lebih besar ke jaringan politik cenderung mendapatkan prioritas dalam pendanaan dan proyek pemerintah, tetapi belum tentu memiliki strategi bisnis yang optimal untuk bertahan dalam pasar yang kompetitif. Ketergantungan pada dukungan politik ini dapat menciptakan risiko financial distress, terutama jika terjadi pergantian kepemimpinan yang mengubah arah kebijakan.

Political Economy of Institutions (North, 1990) berpendapat bahwa stabilitas regulasi dan transparansi dalam kebijakan ekonomi sangat penting untuk memastikan kinerja perusahaan tetap optimal (North, 1990: 95-110). Dalam sistem yang lebih terdesentralisasi dan transparan, perusahaan daerah tidak akan terlalu bergantung pada perubahan dinamika politik, melainkan akan lebih fokus pada inovasi

dan peningkatan daya saingnya di pasar. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pentingnya regulasi yang jelas, kebijakan yang berbasis data, serta mekanisme kontrol yang lebih kuat dalam mengelola hubungan antara pemerintah daerah dan perusahaan daerah.

9. Skema Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pendekatan ekonomi politik liberal, yang menyoroti bagaimana interaksi antara negara dan pasar menentukan hubungan antara dukungan politik dan kinerja badan usaha milik daerah. Dalam konteks ini, penelitian ini mengintegrasikan berbagai teori ekonomi politik untuk menjelaskan ketergantungan BUMD terhadap aktor politik, proses dukungan politik, serta bagaimana hubungan ini memengaruhi kinerja perusahaan.

Pendekatan ekonomi politik yang digunakan dalam penelitian ini berakar pada pemikiran *Political Economy of Institutions* (North, 1990), yang menekankan bahwa institusi politik dan regulasi yang stabil memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi (North, 1990: 120-135). Ketidakpastian regulasi, perubahan kebijakan akibat dinamika politik, serta campur tangan pemerintah yang berlebihan dapat menghambat daya saing perusahaan daerah. Oleh karena itu, stabilitas kelembagaan menjadi salah satu faktor utama

dalam memahami hubungan antara politik dan kinerja badan usaha milik daerah seperti PT SCI.

Dalam memahami mengapa perusahaan daerah bergantung pada dukungan politik, penelitian ini mengacu pada *Public Choice Theory* (Buchanan & Tullock, 1962), yang berpendapat bahwa aktor politik bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka dalam menentukan kebijakan yang mendukung atau menghambat perusahaan daerah (Buchanan & Tullock, 1962: 75-90). Teori ini menunjukkan bahwa keputusan politik sering kali lebih didasarkan pada insentif politik dibandingkan dengan pertimbangan efisiensi ekonomi. Dalam konteks PT SCI, ketergantungan perusahaan terhadap aktor politik tidak hanya disebabkan oleh regulasi yang tidak stabil, tetapi juga oleh keputusan politik yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek bagi para pejabat publik.

Sebagai tambahan, *Rent-Seeking Theory* (Krueger, 1974) memperjelas bahwa BUMD tidak hanya menjadi objek dari intervensi politik, tetapi juga secara aktif mencari keuntungan dari kedekatannya dengan aktor politik. Dalam banyak kasus, perusahaan daerah lebih memilih untuk mengandalkan hubungan politik untuk memperoleh proyek strategis daripada meningkatkan daya saing bisnis mereka. Dalam kasus PT SCI, strategi bisnis sering kali disesuaikan dengan kepentingan politik pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa perusahaan daerah tidak hanya menerima dampak dari dinamika

politik, tetapi juga secara aktif memanfaatkannya untuk bertahan di pasar.

Dalam menjawab bagaimana proses dukungan politik dilaksanakan dalam mendukung kinerja BUMD, penelitian ini menyoroti tiga elemen utama, yaitu penyusunan regulasi, alokasi anggaran, dan jaringan politik. Penyusunan regulasi menjadi aspek kunci dalam menentukan bagaimana perusahaan daerah beroperasi di bawah kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan legislatif. Menurut *Political Economy of Institutions*, regulasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan, sehingga perusahaan daerah harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh aktor politik (North, 1990: 110-125).

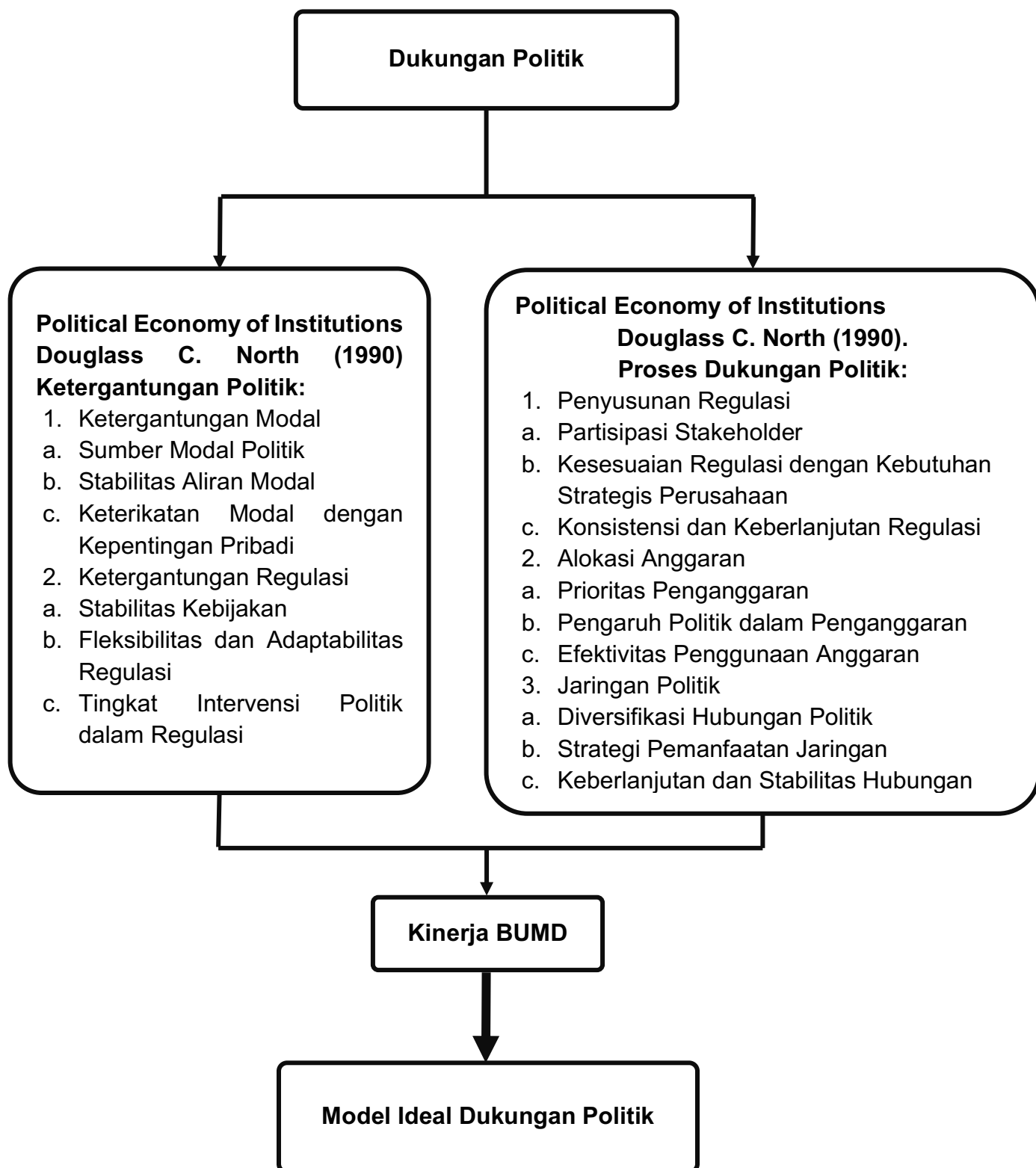
Selain itu, alokasi anggaran juga menjadi faktor yang menentukan seberapa besar dukungan politik yang diberikan kepada perusahaan daerah. Dalam konteks PT SCI, proses penyertaan modal yang bergantung pada persetujuan DPRD menunjukkan bahwa keputusan alokasi anggaran sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Dalam *Public Choice Theory*, fenomena ini dijelaskan sebagai bagian dari strategi politik aktor birokrasi yang bertujuan untuk mempertahankan pengaruh dan kontrol terhadap perusahaan daerah.

Selain regulasi dan alokasi anggaran, jaringan politik juga memainkan peran penting dalam mendukung kinerja badan usaha milik daerah. *Rent-Seeking Theory* menunjukkan bahwa perusahaan yang

memiliki hubungan erat dengan aktor politik lebih mungkin untuk mendapatkan akses ke proyek strategis dan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi secara independen. PT SCI, misalnya, bergantung pada kedekatan dengan pemerintah daerah untuk mengamankan proyek bisnis yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengintegrasikan berbagai teori ekonomi politik untuk memahami bagaimana ketergantungan politik, proses dukungan politik, dan kinerja badan usaha milik daerah saling berinteraksi. Studi ini bertujuan untuk merumuskan model ideal dukungan politik yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan daerah tanpa menciptakan ketergantungan yang merugikan. Struktur hubungan antara variabel penelitian ini digambarkan dalam skema berikut.

Gambar 1. Kerangka/Alur Penelitian



Sumber: Penulis, 2025

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (study case). Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menjelaskan, menggambarkan informasi yang ada pada fenomena inti yang terjadi pada partisipan dalam penelitian dengan lebih mendalam untuk memahami makna dari suatu masalah yang ada pada objek penelitian (Creswell, 2014: 4-6).

Creswell (2007) juga menyatakan bahwa studi kasus merupakan sebuah eksplorasi suatu sistem yang terintegrasi atau suatu kasus/beragam kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks (Creswell, 2007: 73-88). Sedangkan, pendekatan studi kasus merupakan menurut Yin (2009) adalah suatu penelitian sistematis yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan (Yin, 2009: 18-23).

Strategi penelitian studi kasus digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber penelitian (observasi, artefak, arsip,

dokumen, wawancara, sumber-sumber majemuk) secara sistematis terhadap individu, kelompok, organisasi atau kegiatan. Studi kasus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pengertian atau penjelasan dari sebuah fenomena secara menyeluruh (Yin. 2009). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menemukan model tentang dukungan politik terhadap kinerja badan usaha milik daerah Sulawesi Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Kantor Perusahaan Daerah Provinsi Sulsel dan DPRD Provinsi Sulsel selama kurang lebih 2 (dua) bulan

3. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer penulis diperoleh dengan metode secara langsung dari informan yang menjadi objek dari penelitian ini, dimana pada informan ini dilakukan wawancara secara face to face untuk mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang diteliti, metode ini bertujuan agar peneliti mendapatkan banyak informasi valid serta akurat agar dapat menggambarkan hasil dari penelitian secara mendalam, pemilihan informasi dilakukan dengan purposive dimana peneliti memilih informan berdasarkan tujuan perolehan informasi yang diinginkan untuk menjadi data dalam melakukan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti melalui beberapa pelajaran dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian berupa buku–buku, dokumen–dokumen tertulis, berita atau aturan operasional dan lainnya yang berkaitan penelitian yang dilakukan, data sekunder ini juga dapat peneliti peroleh dari hasil penelitian sebelumnya baik yang diperoleh secara online dengan fasilitas yang ada ataupun secara langsung

4. Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive. Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara purposive. Teknik purposive adalah teknik memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dianggap ahli, tahu dan terlibat dalam fokus penelitian, dari pelaksanaan penelitian ini. penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Direktur Utama Perseroan Sulsel
2. Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan
3. Ketua DPRD
4. Ketua Komisi
5. LSM

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang didukung dengan data sekunder untuk memperdalam analisis data primer. Creswell (2007), menyatakan bahwa penekanan studi kasus adalah pada kedalaman dan kerincian wawancara yang mendalam. Penggambaran dan pengungkapan kasus secara rinci. Oleh karena itu, pengumpulan datanya diambil dari berbagai sumber informasi untuk menghasilkan data yang kaya dalam membangun gambaran yang mendalam dari kasus yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam (*in depth interview*).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari partisipan. Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa dengan wawancara dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam tentang dari partisipan tentang interpretasinya terhadap situasi dan fenomena yang terjadi

(Sugiyono, 2014: 82-90). Wawancara dilakukan kepada lembaga Eksekutif, legislatif, maupun pengurus parpol.

b. Observasi

Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, dimaksudkan sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan seorang peneliti. Selain itu terdapat data yang tidak dapat ditanyakan kepada informan, ada diantaranya yang membutuhkan pengamatan secara langsung peneliti. Beberapa item yang perlu di observasi yaitu keadaan tempat situasi sosial politik berlangsung, benda, peralatan, perlengkapan, termasuk letak dan penggunaannya, yang terdapat di lokasi penelitian, para pelaku, termasuk status, jenis kelamin, usia dan sebagainya; kegiatan yang berlangsung, tindakan-tindakan, serta waktu berlangsungnya peristiwa.

c. Dokumen

Dokumen dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder di berbagai literatur seperti laporan-laporan kinerja, buku-buku, maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen-dokumen ini memberikan data obyektif mengenai kerangka kebijakan dan langkah-langkah administratif yang telah diambil, serta mencerminkan proses historis dari pembuatan kebijakan tersebut (Bowen, 2009:29).

6. Fokus Penelitian

Irawan (2006:22) menjelaskan bahwa fokus penelitian menjelaskan tentang fokus kajian. Penelitian ini mengintegrasikan teori *Political Economy of Institutions* (North, 1990), *Public Choice Theory* (Buchanan & Tullock, 1962), dan *Rent-Seeking Theory* (Krueger, 1974) untuk menjelaskan bagaimana dukungan politik baik melalui ketergantungan modal, ketergantungan regulasi, maupun jaringan berpengaruh terhadap kinerja BUMD di Provinsi Sulawesi Selatan (North, 1990: 95-110; Buchanan & Tullock, 1962: 75-90; Krueger, 1974: 291-303).

Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai mekanisme intervensi politik dan implikasinya terhadap efektivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan daerah. Hasil analisis ini nantinya dapat dijadikan dasar dalam merumuskan model ideal dukungan politik yang mampu meningkatkan kinerja BUMD tanpa menimbulkan distorsi yang merugikan. Sebagai upaya untuk melakukan penelitian yang lebih terstruktur serta lebih sistematis, maka ruang lingkup penelitian difokuskan pada ketiga hal berikut.

1. Ketergantungan Politik

Penelitian ini melihat bahwa kinerja BUMD sangat dipengaruhi oleh ketergantungan politik yang terwujud melalui tiga indikator, yaitu ketergantungan modal, ketergantungan

regulasi, dan ketidakmampuan bersaing. Setiap indikator tersebut diuraikan dengan sub indikator sebagai berikut.

a. Ketergantungan modal

- Sumber Modal Politik

Krueger (1974) menyatakan, *Rent-seeking behavior* menghasilkan distorsi dalam distribusi sumber daya yang secara signifikan mempengaruhi efisiensi operasional. Maka dalam penelitian ini akan diidentifikasi jenis dan asal modal yang diperoleh oleh PT SCI serta peran aktor politik dalam penyediaannya.

- Stabilitas Aliran Modal

Berdasarkan *rent seeking theory*, aliran modal yang tidak konsisten sering merupakan hasil dari upaya mendapatkan keuntungan secara tidak berkelanjutan melalui intervensi politik (Krueger, 1974). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan *public choice theory*, keputusan alokasi modal sering dipengaruhi oleh insentif politik yang berubah-ubah. Maka dalam penelitian ini akan diukur konsistensi dan kontinuitas dukungan modal yang diterima dari sumber politik dalam jangka waktu tertentu.

- Keterikatan Modal dengan Kepentingan Politik,

Modal yang disalurkan sering kali disertai dengan syarat atau agenda politik yang mencerminkan kepentingan pribadi atau

kelompok. Buchanan & Tullock (1962) menegaskan, Keputusan politik sering kali dipengaruhi oleh insentif pribadi daripada efisiensi pasar. Dalam penelitian ini akan dinilai sejauh mana modal yang disalurkan mengandung unsur syarat-syarat yang mencerminkan agenda politik, sehingga berdampak pada otonomi operasional BUMD.

b. Ketergantungan Regulasi

Ketergantungan regulasi dieksplorasi dengan menggunakan dua landasan teori, yaitu *Political Economy of Institutions* (North, 1990) dan *Public Choice Theory* (Buchanan & Tullock, 1962). Adapun sub indikator yang digunakan sebagai berikut.

- Stabilitas Kebijakan

Teori *Political Economy of Institutions* (North, 1990) Menekankan pentingnya institusi dan regulasi yang stabil sebagai prasyarat kepastian ekonomi. North (1990) menyatakan, Institusi yang stabil adalah fondasi utama bagi kepastian ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Maka dalam penelitian ini akan dinilai konsistensi dan kepastian hukum regulasi yang mengatur operasional BUMD, mengacu pada pentingnya institusi yang stabil menurut North (1990: 110-125).

- **Fleksibilitas dan Adaptabilitas Regulasi**

Dalam penelitian ini akan diukur kemampuan BUMD dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan yang didorong oleh dinamika politik dengan Mengintegrasikan pandangan *Political Economy of Institutions* untuk menilai kemampuan regulasi dalam beradaptasi dengan dinamika politik, serta *Public Choice Theory* untuk memahami bagaimana perubahan regulasi sering didorong oleh agenda politik tertentu.

- **Tingkat Intervensi Politik dalam Regulasi**

Buchanan & Tullock (1962) menunjukkan, Proses penyusunan regulasi sering kali mencerminkan agenda kepentingan politik daripada kebutuhan efisiensi pasar. Penelitian ini akan mengidentifikasi derajat pengaruh kepentingan politik dalam penyusunan dan penerapan regulasi, sesuai dengan perspektif *Public Choice Theory* (Buchanan & Tullock, 1962: 85-100).

2. Proses Dukungan Politik

Dalam analisis terkait dukungan politik pada PT SCI, penelitian mengidentifikasi tiga indikator utama, yaitu penyusunan regulasi, alokasi anggaran, dan jaringan politik.

a. Penyusunan regulasi

- Partisipasi Stakeholder

Political Economy of Institutions (North, 1990) menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak (BUMD, pejabat daerah, legislatif) dalam penyusunan regulasi guna menciptakan stabilitas dan kepastian hukum (North, 1990: 115-130). Dalam penelitian ini akan dinilai tingkat keterlibatan berbagai pihak (BUMD, pejabat daerah, legislatif) dalam proses perumusan regulasi.

- Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Strategis

Political Economy of Institutions mengaitkan penyusunan regulasi dengan kebutuhan operasional dan strategi pengembangan BUMD. Dalam penelitian ini akan mengidentifikasi kesejajaran antara regulasi yang disusun dengan kebutuhan operasional dan strategi pengembangan BUMD.

- Konsistensi dan Keberlanjutan Regulasi

Political Economy of Institutions menekankan bahwa regulasi yang konsisten dan berkelanjutan merupakan kunci untuk mendukung kinerja ekonomi dan menghindari intervensi sporadis. Dalam penelitian ini akan menilai kontinuitas regulasi dari waktu ke waktu sebagai bentuk stabilitas kelembagaan.

b. Alokasi anggaran

- Prioritas Penganggaran

Public Choice Theory (Buchanan & Tullock, 1962) menjelaskan bahwa penentuan prioritas alokasi anggaran sering kali didasari oleh pertimbangan politik, bukan semata kebutuhan objektif. Penelitian ini akan mengukur kesesuaian antara alokasi dana dengan prioritas kebutuhan strategis dan operasional BUMD (Buchanan & Tullock, 1962: 120-135).

- Pengaruh Politik dalam Penganggaran

Public Choice Theory (Buchanan & Tullock, 1962) Secara eksplisit menunjukkan bahwa intervensi politik merupakan faktor utama dalam penetapan alokasi anggaran. (Buchanan & Tullock, 1962: 120-135). Penelitian ini akan mengidentifikasi tingkat intervensi dan pengaruh kepentingan politik dalam penetapan alokasi anggaran.

- Efektivitas Penggunaan Anggaran

Rent-Seeking Theory (Krueger, 1974) menjelaskan bahwa praktik *rent-seeking* dalam penggunaan anggaran dapat mengakibatkan inefisiensi dan ketidaksesuaian antara dana yang dialokasikan dengan kebutuhan strategis (Krueger, 1974: 291-303). Penelitian ini akan mengukur dampak dan efisiensi dana yang dialokasikan dalam menunjang kinerja dan keberlanjutan BUMD.

c. Jaringan Politik

- Diversifikasi Hubungan Politik

Public Choice Theory menekankan bahwa diversifikasi hubungan dapat mengurangi risiko ketergantungan yang berlebihan dan memaksimalkan manfaat dukungan politik. Penelitian ini akan menilai keberagaman relasi yang terjalin, baik lintas level pemerintahan maupun antar sektor, guna mengurangi risiko ketergantungan yang berlebihan.

- Strategi Pemanfaatan Jaringan

Rent-Seeking Theory menguraikan bahwa strategi aktif dalam memanfaatkan jaringan politik merupakan upaya untuk memperoleh keunggulan kompetitif, meskipun sering kali menimbulkan biaya efisiensi. Penelitian ini akan mengidentifikasi mekanisme dan strategi yang diterapkan oleh BUMD dalam mengoptimalkan jaringan politik untuk mendapatkan dukungan dan akses sumber daya.

- Keberlanjutan dan Stabilitas Hubungan

Penelitian ini akan menilai kontinuitas hubungan politik dalam jangka panjang, yang menjadi indikator penting dalam menjaga dukungan politik secara berkesinambungan menggunakan gabungan pandangan *Rent-Seeking Theory* dan *Public Choice Theory*, di mana hubungan yang berkelanjutan mencerminkan

kesepakatan strategis yang mempertimbangkan kepentingan bersama serta basis keuntungan politik yang terus menerus.

3. Model dan Desain Ideal Dukungan Politik

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model dan desain ideal yang dapat menciptakan hubungan sehat antara dukungan politik dan kinerja badan usaha milik daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan ketergantungan berlebihan, mengoptimalkan efisiensi, serta meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini antara lain yaitu reduksi data (penyaringan/pemilahaan data), display data (penyajian data), verifikasi data (pengujian keabsahan/kebenaran data). Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” dengan melakukan pemotongan (rangkum) data sehingga hanya hal-hal yang pokok saja yang diambil. Display data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian dengan membuat matrik atau tabel.

BAB II

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada dinamika hubungan antara dukungan politik dan kinerja perusahaan daerah, yang dalam konteks ini merujuk pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memahami secara komprehensif relasi tersebut, diperlukan pemetaan menyeluruh terhadap obyek penelitian, baik dalam aspek geografis, demografis, institusional, maupun kontekstual. Gambaran ini menjadi penting untuk menempatkan fenomena penelitian dalam bingkai realitas empiris yang aktual, sehingga setiap temuan nantinya dapat ditafsirkan secara proporsional dalam lanskap sosial-politik dan ekonomi lokal.

Bab ini menyajikan uraian deskriptif mengenai wilayah penelitian, struktur kelembagaan dan regulasi yang mengatur BUMD di tingkat provinsi, serta konfigurasi aktor-aktor politik dan birokrasi yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan daerah. Dengan demikian, pembahasan pada bab ini tidak hanya memuat informasi statis tentang lokasi penelitian, tetapi juga menjelaskan konteks dinamis yang memengaruhi relasi antara kekuasaan politik dan performa organisasi BUMD.

Pemaparan ini dimaksudkan untuk menjembatani antara kerangka teoritik dan lapangan empiris, sehingga analisis dalam bab-bab selanjutnya dapat berakar pada pemahaman yang solid terhadap obyek penelitian. Selain itu, penggambaran obyek ini juga membantu menegaskan mengapa

wilayah dan institusi yang dipilih menjadi fokus utama studi ini, serta bagaimana karakteristik lokalnya dapat merefleksikan persoalan yang lebih luas dalam tata kelola BUMD di Indonesia.

A. Profil Umum PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI)

PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda). PT SCI berdiri sebagai respons terhadap kebutuhan daerah untuk memiliki entitas usaha yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal, sekaligus sebagai wadah pengelolaan sumber daya daerah secara efisien dan bernilai tambah. Sebagai Perseroda, PT SCI berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemegang saham mayoritas, dengan fungsi utama yang bersifat dualistik: sebagai entitas bisnis yang mengejar profit, namun sekaligus memiliki peran sosial dan politis dalam melayani kepentingan pembangunan daerah.

Pembentukan PT SCI dapat dipahami sebagai bagian dari tren nasional dalam upaya revitalisasi BUMD pasca diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi tersebut memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola kekayaan dan sumber daya ekonominya sendiri. Dalam konteks ini, BUMD diharapkan menjadi representasi dari semangat desentralisasi fiskal yang bertumpu pada kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi, dinamika yang menyertai praktiknya memperlihatkan bahwa BUMD, termasuk PT SCI,

sering kali tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi alat kepentingan politik.

PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) telah mengalami transformasi kelembagaan yang signifikan sejak perubahan status hukumnya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) pada tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Transformasi ini secara normatif memberikan landasan hukum yang lebih kuat sekaligus memperluas ruang gerak perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, profesional, dan berorientasi pada efisiensi.

Namun dalam praktiknya, perubahan bentuk hukum tersebut tidak serta-merta menghasilkan kemandirian institusional yang bebas dari pengaruh politik. Sebagaimana ditegaskan oleh teori Political Economy of Institutions yang dikemukakan oleh Douglass North (1990), transisi kelembagaan formal sering kali tidak disertai dengan perubahan dalam praktik kelembagaan informal, yang justru lebih menentukan dalam proses pengambilan keputusan di level implementasi. Kondisi serupa juga dialami oleh PT SCI, yang hingga kini masih beroperasi dalam struktur hubungan yang dipengaruhi oleh kepentingan elite politik lokal. Intervensi tersebut dapat terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari proses penyertaan modal, penunjukan personel strategis, hingga arah kebijakan operasional yang kerap tidak sepenuhnya mencerminkan logika bisnis yang otonom.

PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) memiliki karakteristik institusional yang unik dalam ekosistem ekonomi daerah Sulawesi Selatan. Posisi strategis perusahaan ini tercermin dari cakupan unit usahanya yang luas dan terdiversifikasi. PT SCI tidak hanya beroperasi dalam satu sektor tertentu, tetapi juga menjalankan aktivitas ekonomi di berbagai bidang, seperti jasa, perdagangan, properti, transportasi publik, pengelolaan limbah, hingga penyediaan tenaga kerja alih daya (outsourcing). Diversifikasi ini menunjukkan peran ganda PT SCI sebagai aktor ekonomi sekaligus instrumen pembangunan daerah. Berbeda dengan mayoritas BUMD di provinsi lain yang cenderung bersifat sektoral dan spesifik, PT SCI tampil sebagai entitas multibisnis. Misalnya, di Provinsi Jawa Barat, PT Agro Jabar hanya bergerak di sektor agribisnis, sementara PT Jasa Sarana fokus pada infrastruktur. Perbandingan ini menegaskan bahwa kompleksitas pengelolaan PT SCI menuntut tata kelola yang adaptif, profesional, dan terintegrasi lintas sektor agar mampu menghadirkan kinerja korporasi yang berkelanjutan.

Model bisnis yang diadopsi oleh PT SCI mencerminkan semangat multibisnis yang berpotensi memperluas basis pendapatan dan memperkuat kemandirian keuangan perusahaan. Namun, pada saat yang sama, struktur multibisnis ini juga menyulitkan proses kontrol manajerial dan meningkatkan kompleksitas tata kelola. Lebih jauh, kompleksitas tersebut juga menciptakan ruang yang luas bagi intervensi eksternal, khususnya dari aktor politik, yang memanfaatkan pengaruh mereka untuk

mempengaruhi arah pengembangan unit-unit bisnis sesuai kepentingan tertentu. Dalam teori *Public Choice*, hal ini merupakan gejala umum di mana aktor politik memanfaatkan instrumen ekonomi milik publik untuk memperkuat posisi politiknya.

PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) menempati posisi kelembagaan yang sangat bergantung pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham mayoritas maupun sebagai otoritas yang memberikan mandat terhadap pengelolaan berbagai proyek strategis daerah. Ketergantungan tersebut tidak hanya tercermin dalam relasi struktural yang formal, tetapi juga dalam jaringan relasi informal yang erat kaitannya dengan konfigurasi kekuasaan politik di tingkat lokal. Dalam praktiknya, proses penyertaan modal, pembentukan anak perusahaan, serta pelibatan PT SCI dalam proyek-proyek pemerintah sering kali dilakukan melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya transparan, bahkan cenderung berada di bawah kendali kelompok elite tertentu yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan politik.

Dalam aspek legalitas, PT SCI beroperasi berdasarkan peraturan daerah (Perda) yang menetapkan pembentukan dan pengelolaan Perseroda. Namun, perda tersebut tidak cukup menjamin otonomi PT SCI dalam menentukan arah bisnisnya secara independen. Pengangkatan direksi, misalnya, tetap sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan DPRD. Hal ini senada dengan pendapat Krueger (1974) dalam *Rent-Seeking Theory*, yang menyebutkan

bahwa dalam sistem di mana akses terhadap sumber daya publik dikendalikan oleh aktor politik, entitas bisnis cenderung akan lebih fokus melobi kekuasaan dibanding meningkatkan produktivitas atau daya saing.

Sebagai entitas bisnis, PT SCI memiliki nilai aset yang tergolong besar jika dibandingkan dengan BUMD lain di luar Pulau Jawa. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, total aset PT SCI mencapai lebih dari Rp273 miliar, dengan komposisi aset tetap mendominasi sebesar 94,5% dari total aset. Namun, aset tersebut sebagian besar bersifat tidak *likuid*, sehingga sulit dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan kegiatan bisnis. Kondisi ini mempertegas ketergantungan PT SCI terhadap penyertaan modal dari pemerintah daerah, karena tidak memiliki cukup aset *likuid* untuk membiayai ekspansi usaha secara mandiri.

Posisi strategis PT SCI dalam ekosistem ekonomi Sulawesi Selatan juga tercermin dari keterlibatannya dalam berbagai proyek prioritas pemerintah provinsi. Di antaranya adalah pengelolaan kawasan *Center Point of Indonesia* (CPI), pengoperasian kereta api Makassar–Parepare, serta pengelolaan *food court* Lego-Lego. Keikutsertaan PT SCI dalam proyek-proyek tersebut tidak lepas dari kedekatan antara manajemen perusahaan dengan elite politik lokal. Hubungan ini menciptakan kondisi yang ambivalen: di satu sisi membuka akses terhadap proyek besar, namun di sisi lain menciptakan risiko ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keberpihakan politik.

Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan strategis di PT SCI tidak sepenuhnya dilakukan oleh manajemen secara independen. Banyak kebijakan yang bersifat teknokratis justru harus melalui persetujuan atau koordinasi dengan pemegang kekuasaan politik. Dalam beberapa kasus, keputusan bisnis ditunda atau bahkan dibatalkan karena tidak mendapatkan persetujuan politik yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan PT SCI belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari dominasi kekuasaan politik, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas dan profesionalitas operasional perusahaan.

Situasi ini sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan ekonomi politik institusional. Menurut North (1990), institusi formal seperti hukum dan regulasi hanya akan efektif jika didukung oleh institusi informal yang sehat, seperti etika kerja, transparansi, dan budaya akuntabilitas. Dalam konteks PT SCI, keberadaan regulasi seperti perda belum cukup untuk membangun sistem kelembagaan yang kuat, karena praktik informal yang dipengaruhi oleh kekuasaan politik masih mendominasi proses pengambilan keputusan. Akibatnya, efisiensi dan efektivitas perusahaan sangat bergantung pada dinamika politik, bukan pada logika ekonomi dan profesionalisme bisnis.

Dengan karakteristik seperti ini, PT SCI menjadi contoh konkret bagaimana hubungan antara kekuasaan politik dan perusahaan daerah dapat menciptakan simbiosis yang kompleks. Simbiosis ini dapat membawa manfaat jika dikelola secara profesional dan berlandaskan tata

kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Namun, dalam kondisi di mana kekuasaan politik terlalu mendominasi, hubungan tersebut berisiko menurunkan kinerja perusahaan, merusak integritas tata kelola, serta menghambat terciptanya kemandirian fiskal daerah.

B. Struktur Bisnis dan Organisasi

Sebagai entitas multibisnis, PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) memiliki struktur organisasi dan portofolio bisnis yang kompleks. Tidak seperti BUMD lain yang cenderung fokus pada satu sektor seperti air minum atau transportasi, PT SCI mengadopsi model integratif dan diversifikasi lintas sektor. Model ini tidak hanya mencerminkan ambisi perusahaan dalam memperluas jangkauan dan sumber pendapatan, tetapi juga menjadi strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah minimnya penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Struktur organisasi PT SCI terdiri dari direksi sebagai pelaksana utama operasional, yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, dan bertanggung jawab kepada pemegang saham mayoritas yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada praktiknya, pengangkatan direksi sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama dalam konteks pergantian kepala daerah. Hal ini berdampak langsung terhadap kesinambungan kebijakan strategis yang diambil oleh manajemen perusahaan. Ketika terjadi perubahan politik, tidak jarang terjadi juga pergantian kebijakan dan penyesuaian arah bisnis yang memengaruhi stabilitas internal perusahaan.

PT SCI membawahi beberapa unit bisnis yang dikelola langsung maupun melalui kerja sama dengan mitra swasta atau lembaga pemerintah lainnya. Berikut adalah tabel yang merangkum unit-unit bisnis dan mitra kerja PT SCI:

Tabel 4. Unit dan Program Bisnis PT SCI Sulawesi Selatan

No.	Unit Bisnis	Program	Mitra
1.	Unit parkir	Pengelolaan lahan parkir Mal & Kompleks Latanete Plaza, RS. Fatimah dan Kawasan <i>Center Point of Indonesia</i> .	Mall & Kompleks Latanete Plaza, RS. Fatimah dan Kawasan <i>Center Point of Indonesia</i>
2.	Unit properti dan aset	Pengelolaan hotel Grand Sayang Park, Gedung Juang 45, Ruko dan Mal Latanete Plaza, Eks Rumah Dinas Koptu Harun dan Pengelolaan <i>Food Court</i> Lego-Lego Kawasan CPI.	-
3.	Unit agrobisnis	Pengelolaan pabrik pengolahan jagung dan penjualan pupuk bersubsidi.	PT SRA dan PT PRI
4.	Unit kereta api	Pengelolaan dan pengoperasian kereta api rute Kota Makassar – Kota Parepare.	PT KAI
5.	Unit rental kendaraan	Menyediakan armada kendaraan mulai dari mobil dinas, mobil barang hingga kendaraan truk dan bus.	-
6.	Unit bengkel otomotif	Perawatan dan pemeliharaan kendaraan.	
7.	Unit transporter limbah B3 medis	Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).	PT. Berkah
8.	Unit bisnis <i>food court</i> Lego-lego	Pengelolaan dan penyewaan 36 unit <i>tenant food court</i> lego-lego kepada pemerintah	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Unit Bisnis	Program	Mitra
9.	Unit distributor semen	Penjualan semen kepada kontraktor lokal yang memenangkan proyek pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur di Sulawesi Selatan	PT Semen Tonasa
10.	Unit travel dan perjalanan	Melakukan pemasaran kepada perangkat daerah agar perjalanan dinas dilakukan menggunakan jasa travel perusahaan daerah.	Anta Expres Tour Travel
11.	Unit pengelolaan tambang	Pengelolaan tambang eks Vale di Luwu Timur (Blok Pongkeru, Bulu Balang dan Lingke Utara).	-
12.	Unit bisnis <i>outsourcing</i>	Menyediakan tenaga kerja <i>outsourcing</i> sesuai permintaan dari organisasi perangkat daerah (OPD)	-

Sumber: Penulis, 2025

Unit-unit bisnis tersebut memperlihatkan keberagaman sektor yang dikelola oleh PT SCI, yang seharusnya dapat memberikan bantalan finansial dan fleksibilitas manajemen risiko. Namun, pengelolaan unit-unit ini tidak terlepas dari tantangan internal dan eksternal, khususnya dalam hal koordinasi, pendanaan, dan legitimasi politik.

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi manajemen, PT SCI juga membentuk anak perusahaan yang memiliki otonomi lebih tinggi dalam menjalankan operasional sektor spesifik:

Tabel 5. *Subsidiary Company (Anak Perusahaan) PT SCI Sulawesi Selatan*

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Tahun di Bentuk
1.	PT Sulsel Raja Agro (SRA)	Agrobisnis	2021
2.	PT Mamminasata Raja Trans (MRT)	Transportasi Publik	2021
3.	PT Sulsel Andalan Nusantara (SAN)	<i>Outsourcing</i>	2022
4.	PT Sulsel Tirta Sejahtera (STS)	Sistem Penyedia Air Minum (SPAM)	

Sumber: Penulis, 2025

Keberadaan anak perusahaan ini merepresentasikan strategi pemisahan fungsi bisnis secara kelembagaan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan fokus sektor. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan anak-anak perusahaan ini juga sangat dipengaruhi oleh keputusan strategis di tingkat *holding*, yang tidak jarang masih dikendalikan oleh pengaruh eksternal, khususnya kekuasaan politik lokal.

Dalam teori organisasi publik, struktur seperti ini disebut sebagai *hybrid model*, yakni kombinasi antara logika pasar dan logika birokrasi. Model ini membawa keunggulan dari sisi fleksibilitas manajerial, tetapi juga menimbulkan persoalan koordinasi dan pertanggungjawaban ganda (*dual accountability*). PT SCI tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (Gubernur sebagai kepala daerah), tetapi juga kepada publik sebagai entitas yang menggunakan anggaran negara dan mengelola aset daerah.

Permasalahan muncul ketika keputusan bisnis strategis, misalnya ekspansi ke sektor tambang, SPAM, atau kereta api tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika politik yang berkembang di level pemerintahan. Misalnya, pembentukan PT Sulsel Tirta Sejahtera sebagai penyedia air minum daerah sangat erat kaitannya dengan agenda politik pelayanan publik yang dicanangkan oleh kepala daerah tertentu. Ketika kepala daerah berganti, prioritas proyek pun berubah, dan anak perusahaan tersebut bisa saja kehilangan arah strategis.

Situasi ini sesuai dengan konsep *interest group* (Kelompok Kepentingan), di mana PT SCI dan anak-anak perusahaannya dapat dipahami sebagai agen atau perpanjangan tangan dari agenda politik kelompok tertentu di pemerintahan. Dalam situasi ini, organisasi perusahaan tidak beroperasi sebagai entitas bisnis murni, melainkan sebagai bagian dari arena politik yang sarat kepentingan.

Dengan kompleksitas seperti itu, struktur bisnis PT SCI menjadi sangat sensitif terhadap perubahan politik. Hal ini menempatkan posisi direksi dan manajemen dalam dilema antara menjalankan prinsip profesionalisme bisnis atau menjaga kedekatan dengan aktor politik demi kelangsungan dukungan dan akses terhadap proyek strategis.

C. Ketergantungan Politik dan Intervensi Kebijakan

Ketergantungan politik merupakan realitas yang tidak terhindarkan dalam praktik pengelolaan perusahaan daerah seperti PT Sulsel Citra

Indonesia (PT SCI). Sebagai entitas bisnis yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah daerah, PT SCI berada dalam posisi struktural yang menempatkannya pada irisan antara logika korporasi dan logika kekuasaan. Keputusan bisnis tidak dapat dilepaskan dari intervensi aktor-aktor politik lokal yang memiliki otoritas terhadap sumber daya strategis seperti penyertaan modal, pengesahan anggaran, dan penunjukan direksi.

Kondisi ini membuat PT SCI mengalami ketergantungan tinggi terhadap dukungan politik untuk menjalankan operasional maupun melakukan ekspansi. Salah satu indikator konkret dari ketergantungan tersebut adalah permasalahan penyertaan modal. Berdasarkan laporan keuangan dan notulensi internal yang dimuat dalam Laporan Kinerja PT SCI, sejak tahun 2010 hingga 2023, proposal penyertaan modal telah diajukan lebih dari lima kali ke DPRD Sulawesi Selatan. Namun, hanya satu kali mendapat persetujuan, yaitu sebesar Rp. 2 miliar pada tahun 2022, jauh di bawah kebutuhan modal kerja perusahaan.

Tabel 6. Rekapitulasi Usulan dan Realisasi Penyertaan Modal PT SCI ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Usulan Penyertaan Modal	Realisasi	Keterangan
1.	Rp10 Miliar	Tidak disetujui	Ditolak DPRD dengan alasan belum layak usaha
2.	Rp25 Miliar	Tidak disetujui	Dianggap tidak prioritas dalam RKPD
3.	Rp50 Miliar	Tidak disetujui	Proses terganjal akibat konflik legislatif-eksekutif
4.	Rp20 Miliar	Rp2 Miliar	Disetujui sebagian, hanya untuk penguatan permodalan SPAM
5.	Rp30 Miliar	Tidak disetujui	Tidak ada titik temu dalam pembahasan di Banggar

Sumber: Penulis, 2025

Tabel di atas memperlihatkan bahwa meskipun PT SCI secara aktif mengusulkan modal tambahan untuk memperkuat bisnisnya, proses politik di lingkungan DPRD menjadi hambatan utama. Proses penganggaran di DPRD yang sarat dengan kepentingan fraksi, pengaruh elite politik, serta dinamika hubungan antara gubernur dan legislatif menjadikan PT SCI sebagai “korban” tarik-menarik kekuasaan. Dalam hal ini, PT SCI tidak hanya dilihat sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai komoditas politik yang nilainya tergantung pada afiliasi dan *bargaining position*-nya terhadap kekuasaan.

Teori *Public Choice* yang dikembangkan oleh Buchanan dan Tullock sangat relevan untuk membaca kondisi ini. Teori ini menyatakan bahwa pengambil kebijakan dalam sektor publik cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, bukan semata-mata

demi kepentingan publik. Dalam konteks PT SCI, penolakan terhadap penyertaan modal bukan selalu disebabkan oleh ketidaksiapan perusahaan secara teknis, tetapi lebih karena tidak adanya insentif politik yang cukup bagi anggota DPRD untuk menyetujui alokasi tersebut. Dengan kata lain, dukungan kepada PT SCI akan muncul jika ada kepentingan politik yang bisa diakomodasi oleh keputusan tersebut.

Relasi antara PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) dan aktor-aktor kekuasaan politik lokal menunjukkan kecenderungan kuat terhadap praktik rent-seeking, di mana akses terhadap proyek strategis, konsesi, dan sumber daya pemerintah lebih sering diperoleh melalui jalur politis daripada melalui mekanisme pasar yang kompetitif. Dalam konteks ini, rent-seeking tidak sekadar merujuk pada upaya memperoleh keuntungan melalui saluran non-produktif, tetapi juga menggambarkan strategi perusahaan dalam mengamankan keberlanjutan operasional melalui kedekatan dengan kekuasaan. Sebagian besar energi kelembagaan PT SCI justru terserap untuk membangun dan mempertahankan akses terhadap jaringan politik, alih-alih difokuskan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi bisnis. Akibatnya, perusahaan tidak hanya mengalami penurunan efisiensi internal, tetapi juga terjebak dalam praktik-praktik yang menimbulkan moral *hazard* yakni perilaku pengambilan risiko yang berlebihan karena merasa terlindungi oleh kedekatan dengan kekuasaan. Situasi ini mencerminkan lemahnya tata kelola berbasis meritokrasi dan memperkuat distorsi dalam alokasi sumber daya publik.

Sebagai contoh, pada tahun 2022 PT SCI berhasil memperoleh sebagian kecil penyertaan modal yang kemudian digunakan untuk memperkuat sektor air minum (SPAM) melalui anak perusahaannya, PT Sulsel Tirta Sejahtera. Namun, proyek tersebut berjalan sangat lambat karena pergantian kepala daerah mengubah prioritas kebijakan. Komitmen yang semula diberikan oleh pemerintahan sebelumnya ditinggalkan begitu saja oleh pengganti, sehingga PT SCI harus kembali melakukan lobi-lobi politik demi menyelamatkan proyek tersebut.

Selain penyertaan modal, intervensi politik juga terjadi dalam penentuan proyek strategis yang dikelola oleh PT SCI. Banyak proyek yang secara teknis bisa dikembangkan oleh pihak swasta, namun justru dialihkan ke PT SCI karena adanya kedekatan manajemen dengan pejabat publik. Hal ini menyebabkan PT SCI terjebak dalam peran sebagai “perpanjangan tangan proyek pemerintah”, bukan sebagai pelaku usaha yang profesional dan kompetitif. Misalnya, pengelolaan kawasan Lego-Lego dan sebagian lahan CPI (*Center Point of Indonesia*) merupakan hasil dari keputusan politik, bukan kajian bisnis yang bersifat independen.

Dalam sudut pandang *Political Economy of Institutions* (North, 1990), dominasi kekuasaan politik terhadap PT SCI mencerminkan kegagalan institusional dalam menciptakan ruang usaha yang stabil dan prediktif. North menekankan bahwa ekonomi yang berkembang adalah ekonomi yang ditopang oleh institusi formal dan informal yang konsisten dan berorientasi pada jangka panjang. Namun, dalam konteks PT SCI,

konsistensi kelembagaan tidak tercapai karena kebijakan publik sangat bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Hal ini menyebabkan perencanaan jangka panjang menjadi tidak realistis, karena kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada arah politik yang sedang dominan.

Kondisi ini tentu membawa implikasi serius terhadap kinerja perusahaan. Ketika arah bisnis ditentukan oleh pertimbangan politik jangka pendek, maka perusahaan akan kehilangan fleksibilitas strategis dan kesulitan untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan investor. Dalam banyak kasus, calon mitra bisnis cenderung menunda kerja sama dengan PT SCI karena khawatir akan adanya perubahan kebijakan secara tiba-tiba. Hal ini tentu menjadi hambatan besar dalam membangun kepercayaan dan reputasi sebagai entitas bisnis yang kredibel.

Selain itu, struktur organisasi PT SCI pun tidak sepenuhnya bebas dari tekanan politik. Dalam beberapa periode, pengangkatan direksi dan komisaris dilakukan berdasarkan kompromi politik tertentu. Hal ini menyebabkan munculnya kekhawatiran terhadap kompetensi manajerial dan profesionalisme di tingkat pimpinan perusahaan. Bukan tidak mungkin jika loyalitas politik menjadi lebih dominan dibandingkan dengan kapabilitas teknis dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Ketika perusahaan dikendalikan oleh kepentingan politik, maka tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) menjadi sulit untuk diwujudkan.

Dalam studi-studi mengenai BUMD di Indonesia, ketergantungan politik seperti ini bukanlah hal baru. Banyak BUMD di daerah lain juga menghadapi kondisi serupa, di mana perusahaan tidak dapat berkembang optimal karena tidak memiliki otonomi strategis. Namun, yang membedakan PT SCI adalah tingkat ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap keputusan politik, sekaligus minimnya diversifikasi sumber modal eksternal. Kondisi ini menjadikan PT SCI sebagai entitas yang “hidup segan, mati tak mau”, karena terlalu besar untuk gagal, namun terlalu bergantung untuk berkembang.

D. Ketidakpastian Institusional dan Implikasi Terhadap Kinerja

Konsekuensi dari relasi yang terlalu erat antara PT SCI dengan kekuasaan politik adalah munculnya ketidakpastian institusional yang tinggi. Ketidakpastian ini berakar dari tidak stabilnya kerangka regulatif dan kebijakan yang mengatur perusahaan, baik yang bersifat normatif maupun politis. Dalam konteks perusahaan daerah, ketidakpastian institusional muncul ketika arah kebijakan pemerintah sebagai pemilik perusahaan berubah-ubah, tidak konsisten, dan tidak dapat diprediksi. Hal ini menyebabkan PT SCI sulit membangun perencanaan jangka panjang yang kredibel dan berkelanjutan.

Ketidakpastian ini dapat dilihat pada berbagai aspek kebijakan, mulai dari pengangkatan direksi, perubahan arah bisnis, hingga komitmen terhadap penyertaan modal dan pembagian proyek strategis. Misalnya, pada masa kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan periode

sebelumnya, PT SCI mendapatkan peran penting dalam pengelolaan kawasan *Center Point of Indonesia* (CPI) dan pembangunan sistem air minum. Namun, setelah pergantian kepala daerah, dukungan terhadap proyek-proyek tersebut menurun drastis. Pemerintah baru memiliki prioritas pembangunan yang berbeda, sehingga proyek-proyek yang sempat dipersiapkan akhirnya mangkrak, atau hanya berjalan setengah hati.

Kondisi ini memperkuat pendapat North (1990) dalam *Political Economy of Institutions* yang menyatakan bahwa institusi formal seperti undang-undang atau perda tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif apabila tidak didukung oleh institusi informal seperti budaya birokrasi, konsistensi politik, dan keberlanjutan kepemimpinan. Dalam kasus PT SCI, peraturan daerah yang menjadi dasar pembentukan perusahaan memang ada, tetapi implementasinya sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dan *elite* politik yang sedang berkuasa. Akibatnya, aturan menjadi tidak operasional karena interpretasi dan pelaksanaannya berubah-ubah seiring perubahan kekuasaan.

Manifestasi dari ketidakpastian ini adalah rendahnya daya tarik PT SCI di mata investor. Dalam beberapa laporan internal, disebutkan bahwa PT SCI pernah mengadakan peninjauan kerja sama dengan beberapa mitra swasta untuk mengembangkan sektor agrobisnis dan pengelolaan limbah. Namun, setelah dilakukan *due diligence*, mitra bisnis mundur karena menilai adanya risiko politis yang tinggi terhadap kelangsungan

proyek. Mereka menyoroti kemungkinan intervensi kebijakan atau perubahan kebijakan secara sepihak dari pemerintah daerah, yang dapat membatalkan atau merevisi perjanjian secara tiba-tiba.

Ketidakpastian ini juga menghambat proses penyusunan rencana strategis jangka menengah (*business plan*) perusahaan. Setiap kali terjadi pergantian kepala daerah atau pemilihan legislatif, manajemen PT SCI harus menyesuaikan kembali rencana bisnis mereka untuk mengakomodasi kemungkinan perubahan kebijakan. Ini membuat dokumen perencanaan sering kali bersifat reaktif, bukan proaktif. Dalam konteks manajemen strategis, kondisi ini jelas tidak ideal karena menghambat inovasi dan pengambilan keputusan yang visioner.

Lebih jauh lagi, ketidakpastian institusional menyebabkan adanya status *quo* dalam manajemen keuangan perusahaan. PT SCI tidak dapat menyusun target pendapatan dan belanja modal secara konsisten karena tidak tahu apakah dukungan pemerintah akan tetap diberikan atau justru ditarik. Hal ini tercermin dalam laporan keuangan tahun 2021–2023, di mana realisasi belanja modal jauh lebih rendah dibandingkan rencana. Sebagian besar proyek pengembangan baru ditunda atau dibatalkan karena tidak adanya kejelasan dari sisi pendanaan dan regulasi.

Tabel 7. Perbandingan Rencana dan Realisasi Belanja Modal PT SCI (2021–2023)

No.	Rencana Belanja Modal	Realisasi	Persentase Realisasi	Keterangan
1.	Rp.25 Miliar	Rp2,8 Miliar	11,2%	Tidak ada penyertaan modal baru dari Pemprov
2.	Rp.30 Miliar	Rp5,2 Miliar	17,3%	Realisasi terbatas pada sektor air minum (SPAM)
3.	Rp.35 Miliar	Rp4,1 Miliar	11,7%	Beberapa proyek ditunda karena belum ada payung hukum final

Sumber: LPJ PT SCI 2021-2023

Dari tabel di atas tampak jelas bahwa realisasi belanja modal jauh dari target. Dalam literatur manajemen keuangan korporasi, kondisi ini mencerminkan risiko regulatif yang tinggi dan ketergantungan terhadap variabel politik dalam proses belanja modal. Akibatnya, PT SCI tidak dapat melakukan ekspansi bisnis secara optimal, yang berdampak pada stagnasi pendapatan.

Ketidakpastian institusional juga berdampak pada sumber daya manusia (SDM) di internal perusahaan. Dengan arah kebijakan yang tidak menentu, pegawai dan manajer mengalami kesulitan untuk menetapkan target kinerja yang jelas. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi kebingungan internal mengenai proyek mana yang menjadi prioritas, dan siapa mitra yang sah, karena terjadi perubahan orientasi kebijakan yang sangat cepat. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya motivasi kerja dan hilangnya *sense of purpose* dalam organisasi.

Dari perspektif *governance*, kondisi ini mencerminkan rendahnya kualitas *corporate governance* dalam struktur organisasi PT SCI. Padahal dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), diperlukan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan akuntabilitas yang tinggi agar entitas bisnis dapat menjalankan fungsinya secara sehat. Tanpa jaminan keberlanjutan kebijakan, sangat sulit bagi perusahaan untuk merancang sistem kontrol internal yang kuat, menyusun sistem evaluasi kinerja yang obyektif, maupun mengembangkan kompetensi SDM secara berkelanjutan.

Terakhir, ketidakpastian institusional juga memperlemah posisi tawar (*bargaining position*) PT SCI dalam menghadapi aktor-aktor politik. Karena tidak memiliki kekuatan mandiri secara finansial, perusahaan harus terus-menerus menjaga kedekatan dengan kekuasaan politik untuk memastikan kelangsungan usahanya. Dalam konteks ini, PT SCI bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga entitas yang harus bernegosiasi secara terus-menerus dengan institusi politik. Proses ini menyita energi manajerial dan memperbesar risiko konflik kepentingan, serta menurunkan profesionalisme korporat.

E. Simbiosis Politik-Bisnis: Suatu Keniscayaan

Dalam studi ekonomi politik, relasi antara bisnis dan politik bukan sekadar interaksi, melainkan suatu bentuk simbiosis yang saling memengaruhi. PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) adalah contoh konkret bagaimana perusahaan daerah di Indonesia tidak hanya bertindak

sebagai entitas ekonomi, tetapi juga memainkan peran sebagai aktor politik yang turut berkontribusi pada stabilitas, bahkan kelangsungan kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, PT SCI tidak hanya sebagai objek dari pengaruh politik, melainkan juga subjek yang membentuk strategi bisnisnya melalui pendekatan kepada elite kekuasaan. Relasi seperti ini menciptakan bentuk simbiosis politik-bisnis yang kompleks: saling membutuhkan, saling menguntungkan, namun juga saling membatasi.

Simbiosis ini paling terlihat dalam praktik pemberian proyek, kemudahan akses terhadap sumber daya publik, dan posisi PT SCI sebagai mitra strategis dalam berbagai program pembangunan daerah. Pemerintah daerah, sebagai pemilik saham mayoritas, menggunakan PT SCI sebagai alat eksekusi kebijakan pembangunan di sektor-sektor yang sensitif seperti transportasi, air bersih, dan pengelolaan aset daerah. Sementara itu, PT SCI memperoleh keuntungan melalui akses terhadap proyek eksklusif, pengurangan hambatan regulatif, serta legitimasi dari dukungan politik yang melekat.

Dalam perspektif teori *Interest Group*, PT SCI dapat diposisikan sebagai kelompok kepentingan yang berusaha memperkuat posisinya melalui jaringan relasi dengan penguasa politik. Seperti disampaikan oleh Mancur Olson, kelompok kepentingan cenderung memengaruhi kebijakan publik demi mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini, PT SCI membentuk posisi tawar (*bargaining position*) melalui pembuktian bahwa

kehadiran mereka mendukung keberhasilan program-program strategis pemerintah daerah. Dengan membangun narasi sebagai mitra pembangunan, PT SCI memperoleh ruang negosiasi yang lebih kuat dalam forum-forum pengambilan keputusan.

Namun, *bargaining position* yang dibangun dengan pendekatan politik ini bersifat fluktuatif dan tidak berjangka panjang. Ketika pemerintahan berganti, narasi yang dibangun sebelumnya bisa saja kehilangan relevansi. Posisi tawar PT SCI akan menurun jika dianggap tidak lagi sejalan dengan visi politik pemimpin baru. Dalam konteks ini, hubungan simbiotik dengan elite kekuasaan menjadi pedang bermata dua: ia bisa menjadi alat penguatan posisi strategis, tetapi juga sumber ketergantungan yang rentan terhadap perubahan politik.

Praktik ini dapat diamati dalam proyek kereta api Makassar–Parepare, yang semula dikelola oleh PT SCI melalui PT Mamminasata Raja Trans. Dalam perjalanannya, proyek tersebut mengalami perlambatan karena terjadi perubahan prioritas politik, meskipun secara teknis dan bisnis proyek itu memiliki prospek yang menjanjikan. Pengaruh perubahan politik terhadap proyek ini mencerminkan lemahnya otonomi perusahaan dalam mempertahankan posisinya secara independen dari kekuasaan.

Relasi simbiotik ini juga tampak dalam cara PT SCI mengelola komunikasi politiknya. Dalam berbagai forum publik, manajemen PT SCI secara aktif menekankan pentingnya dukungan politik terhadap

keberlanjutan bisnis mereka. Bahkan dalam laporan tahunan dan paparan publik, manajemen menggunakan bahasa yang sangat politis seperti “komitmen bersama membangun Sulsel,” “dukungan legislatif untuk kemajuan BUMD,” atau “kerja sama lintas sektor demi keberlanjutan pembangunan daerah.” Strategi komunikasi ini adalah bentuk adaptasi manajerial dalam merespons kondisi politik daerah yang tidak stabil dan cenderung berubah cepat.

Fenomena ini juga mengindikasikan adanya pelembagaan ketergantungan (*institutionalized dependence*), di mana intervensi politik tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap independensi perusahaan, tetapi justru dipandang sebagai bagian dari “strategi bertahan hidup.” Dalam berbagai wawancara dengan internal PT SCI, terungkap bahwa beberapa manajer menilai pendekatan politik sebagai keahlian yang harus dimiliki oleh manajemen puncak, setara dengan kemampuan finansial atau teknis. Ini menandakan bahwa keterlibatan politik telah menjadi bagian dari habitus kelembagaan perusahaan.

Dalam praktik sehari-hari, simbiosis ini berjalan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah penunjukan tenaga kerja *outsourcing* di berbagai dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) oleh anak perusahaan PT SCI. Meski secara teknis PT SCI menjalankan proses rekrutmen secara profesional, dalam praktiknya terdapat preferensi terhadap tenaga kerja yang direkomendasikan oleh tokoh-tokoh politik lokal. Hal ini menciptakan jaring patronase yang kuat, di mana PT SCI

menjadi bagian dari sistem distribusi “hadiah politik,” baik dalam bentuk pekerjaan, proyek, maupun keuntungan lainnya.

Konsekuensi jangka panjang dari simbiosis ini adalah penurunan profesionalisme dan pelemahan tata kelola perusahaan. Ketika perusahaan terlalu fokus membangun dan menjaga hubungan politik, perhatian terhadap efisiensi operasional, inovasi bisnis, dan tata kelola internal menjadi berkurang. Hal ini menghambat kemampuan perusahaan untuk bersaing secara sehat di pasar terbuka, dan pada akhirnya menurunkan nilai ekonominya bagi pemegang saham.

Simbiosis antara kekuatan politik dan kepentingan bisnis dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI), secara lebih jauh menciptakan ruang bagi berkembangnya politik transaksional di tingkat lokal. Ketika BUMD diposisikan sebagai instrumen untuk memenuhi agenda politik kelompok elite, keberadaannya tidak lagi sekadar menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi alat distribusi sumber daya dan kekuasaan. Dalam konfigurasi semacam ini, politisi memiliki insentif kuat untuk mempertahankan kendali atas struktur manajerial perusahaan guna memastikan bahwa kepentingan politik mereka tetap terakomodasi. Konsekuensinya, proses pengangkatan direksi dan pengambilan keputusan strategis sering kali tidak didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan meritokrasi, melainkan pada logika akomodasi terhadap aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik dominan. Hal ini tidak

hanya melemahkan kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga memperkuat patronase politik yang menghambat terwujudnya tata kelola korporasi daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi kinerja.

Keberadaan hubungan yang erat antara PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak selalu harus dimaknai secara negatif. Dalam konteks ketidakpastian kelembagaan dan keterbatasan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah, kedekatan institusional antara BUMD dan otoritas politik dapat menjadi peluang strategis. Apabila dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik, relasi ini justru dapat membentuk fondasi kolaboratif yang kuat, terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jangka panjang yang tidak menarik bagi sektor swasta akibat skala investasi yang besar dan tingkat risiko yang tinggi.

Dengan kata lain, simbiosis politik-bisnis bukan semata-mata negatif. Yang menjadi persoalan adalah ketika relasi ini tidak didasari pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), melainkan hanya pada pertimbangan pragmatis dan politis jangka pendek. Tanpa pembenahan institusional yang serius, PT SCI berisiko menjadi sekadar “perusahaan proyek” yang eksistensinya bergantung pada rezim politik yang sedang berkuasa, bukan pada kekuatan bisnisnya sendiri.

Melalui pendekatan deskriptif dan analitis terhadap profil, struktur bisnis dan dinamika kelembagaan PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI), terungkap bahwa PT SCI tidak hanya menjalankan peran sebagai entitas

bisnis milik daerah, tetapi juga sebagai bagian integral dari jaringan kekuasaan lokal yang sarat dengan dinamika kepentingan politik.

PT SCI merupakan representasi nyata dari kompleksitas peran BUMD dalam sistem otonomi daerah di Indonesia. Dengan cakupan usaha yang luas dan struktur organisasi multibisnis, PT SCI memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian daerah. Namun, potensi tersebut dibayangi oleh realitas kelembagaan yang masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya kekuasaan politik di tingkat provinsi.

Ketergantungan terhadap kebijakan politik terlihat jelas dalam beberapa aspek utama: usulan penyertaan modal yang berulang kali tidak disetujui oleh DPRD, perubahan orientasi proyek karena pergantian kepala daerah, hingga fluktuasi kebijakan yang berdampak langsung pada kelangsungan anak perusahaan. Intervensi politik juga tampak dalam pengangkatan manajemen, pembagian proyek strategis, dan bahkan dalam penyaluran tenaga kerja *outsourcing* yang dikelola oleh anak usaha PT SCI.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam konteks kelembagaan daerah, PT SCI beroperasi di bawah logika politik yang kerap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang sehat. Teori-teori seperti *Public Choice*, *Rent-Seeking*, dan *Political Economy of Institutions* memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana logika kekuasaan bekerja dalam membentuk kebijakan dan perilaku institusi bisnis daerah. PT SCI, sebagaimana telah dibahas, cenderung lebih aktif dalam membangun relasi politik dibanding memperkuat kapabilitas bisnis

murninya. Ketika dukungan politik menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan usaha, maka efisiensi ekonomi cenderung dikorbankan demi kepentingan akses dan stabilitas politik jangka pendek.

Simbiosis antara kekuatan politik dan entitas bisnis daerah bukan merupakan entitas yang secara inheren problematik. Permasalahan yang krusial justru terletak pada cara relasi tersebut dijalankan: apakah berlandaskan pada prinsip good governance, ataukah semata-mata dikendalikan oleh logika pragmatisme politik jangka pendek. Tanpa pembenahan institusional yang serius, PT SCI berisiko mengalami degradasi peran sebagai perusahaan publik dan terjebak menjadi sekadar “perusahaan proyek” yang eksistensinya bergantung pada rezim politik yang sedang berkuasa, bukan pada kekuatan bisnisnya sendiri.

Tantangan utama bagi PT Sulsel Citra Indonesia (PT SCI) ke depan bukan hanya terletak pada aspek kinerja keuangan atau pengembangan unit usaha, tetapi terutama pada upaya membangun kemandirian institusional yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi secara stabil meskipun terjadi pergantian kepemimpinan politik. Pembangunan sistem internal yang kuat, penegasan peran antara pemilik dan pengelola, serta perancangan mekanisme transparansi dalam relasi bisnis-politik merupakan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk melepaskan perusahaan dari jebakan ketergantungan politik yang berkepanjangan.

Bagian ini menjadi fondasi penting untuk memahami konteks empiris penelitian. Pemaparan mengenai profil, struktur organisasi, ketergantungan

politik, dan dinamika simbiotik antara PT SCI dengan kekuasaan lokal akan menjadi pijakan dalam menganalisis lebih lanjut bagaimana ketergantungan politik ini memengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan strategis di perusahaan. Selanjutnya, Bab IV akan membahas hasil temuan penelitian di lapangan yang mengkaji lebih dalam bagaimana praktik dukungan politik terbentuk, dijalankan, serta dampaknya terhadap kinerja PT SCI. Bab tersebut juga akan menganalisis pola relasi antara PT SCI dan para aktor politik utama dengan pendekatan teoritik yang telah dijelaskan sebelumnya.